



Laporan Kinerja

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

TAHUN ANGGARAN 2023



Alhamdulillah, tahun anggaran 2023 telah berhasil dilewati Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air cukup baik dengan capaian kinerja yang mendekati angka sempurna. Hal tersebut bisa terjadi berkat pertolongan Allah SWT, Kerja keras dan kekompakan tim Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya serta dukungan rekan-rekan baik internal maupun eksternal Kementerian PUPR.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi ataupun Kementerian Lembaga yang akuntabel.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja ini akan diuraikan mengenai histori dari awal perencanaan hingga pencapaian akhir kinerja selama tahun anggaran 2023.

Demikian laporan kinerja ini disusun. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2023 dan menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air



ARVY ARGYANTORO, MA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pasal 545, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain tugas tersebut, Direktorat PPSIDA juga memiliki kedudukan dan fungsi yang telah diamanatkan yaitu sebagai berikut:

KEDUDUKAN:

Unit kerja Direktorat PPSIDA dipimpin oleh Direktur PPSIDA yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

FUNGSI:

Direktorat PPSIDA dalam melaksanakan tugas yang tersebutkan di atas, dibutuhkan fungsi dalam menyelenggarakannya:

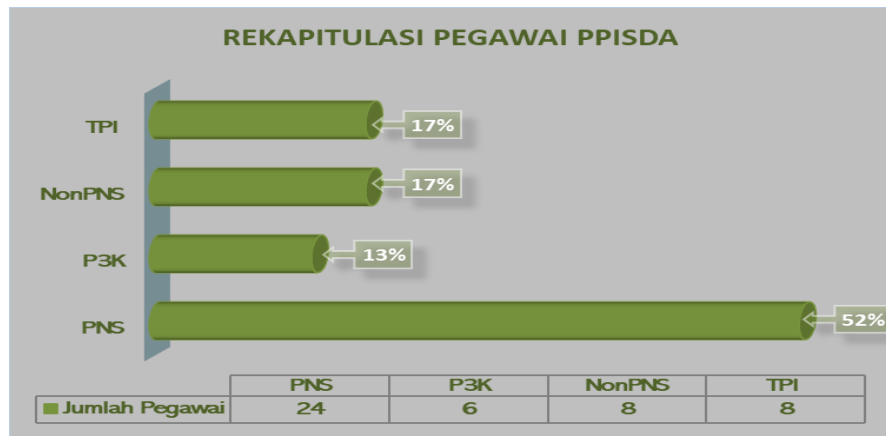
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
3. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
4. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
5. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
6. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada awal tahun

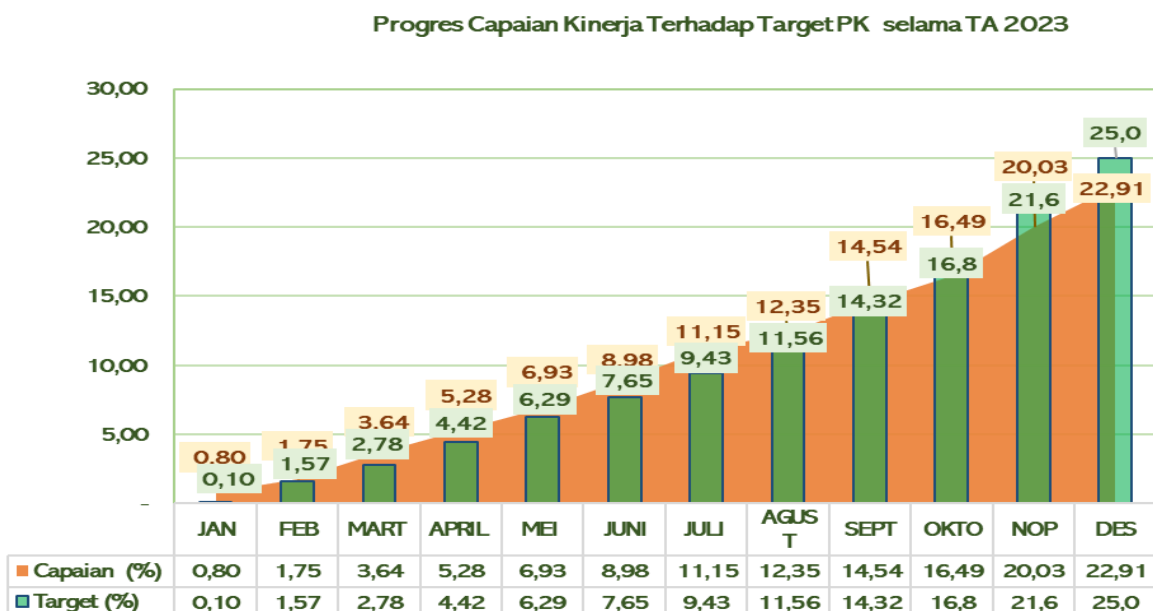


2023 telah menetapkan perjanjian kinerja yang mencakup 1 sasaran kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 12.399.643.000.000,00 Sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 033.16.1.631003/2023 tanggal 30 Nopember 2022. Pada bulan Desember mengalami revisi PK yang disebabkan adanya optimalisasi anggaran (perubahan pagu dipa) dengan pagu revisi sebesar Rp 11.199.643.000,00

Jumlah Pegawai Direktorat PPISDA selama TA 2023 sebanyak 46 orang, terdiri dari 24 orang PNS, 6 orang P3K, 8 orang NonPNS dan 8 orang TPI, seperti pada grafik disamping:



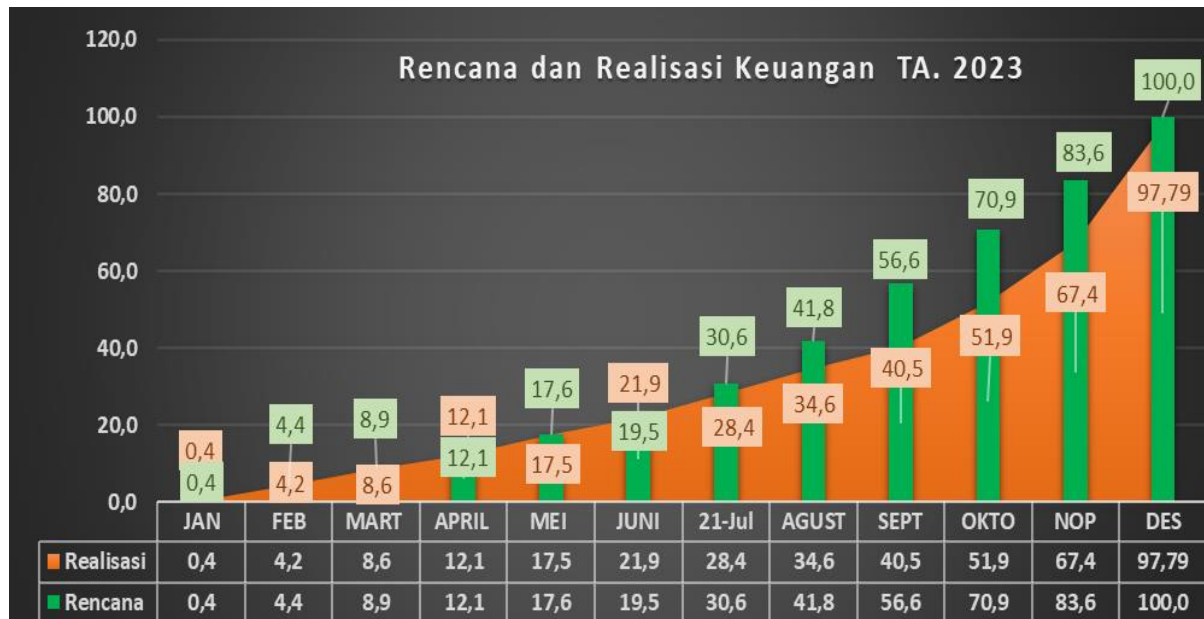
Progres capaian Kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023 berdasarkan target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada garfik di bawah ini:



Pada akhir tahun capaian kinerja Direktorat PPISDA sebesar 22,91% dari target sebesar 25%. Realisasi anggaran Direktorat PPISDA TA 2023 sebesar Rp



10.952.077,000,00 setara dengan 97,79% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.300.643.000,00 sesuai anggaran sebesar Rp 247.566.000,00. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,83%. Pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air sebesar 98,83% Jika dilihat dari tabel warna capaian kinerja bulanan yang ada di aplikasi emonitoring pupr, apabila nilai capaian kinerja dengan kriteria kinerja > 85% persentasinya maka berada pada zona warna biru dan diinterpretasikan MEMUASKAN.



Rencana dan Realiasi Anggaran Direktorat PPISDA TA 2023

Pada tahun 2023 Direktorat PPISDA melaksanakan 10 proyek KPBUs sektor sumber daya air. Enam proyek pada tahapan penyiapan yaitu proyek KPBUs Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, PLTM Bendungan Jenelata, Daerah Irigasi Lhok Guci, PLTM Leuwikeris dan Bendungan dan PLTA Papua. Selain itu terdapat 4 proyek pada tahapan transaksi, yaitu proyek KPBUs Bendungan dan PLTM Bintang Bano, PLTA Tiga Dihaji, Daerah Irigasi Komering dan Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok.



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 TUGAS DAN FUNGSI	3
	1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4 ISU STRATEGIS	6
	1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	10
	2.1.1 SASARAN KEGIATAN	12
	2.1.2 ARAH KEBIJAKAN	15
	2.1.3 STRATEGI	15
	2.2 PERJANJIAN KINERJA	17
	2.2.1 PERJANJIAN KINERJA AWAL	17
	2.2.2 PERJANJIAN KINERJA AKHIR	18
	2.2.3 REVISI PERJANJIAN KINERJA	19
	2.3 METODE PENGUKURAN	19
	2.4 TARGET TAHUN 2023 MENURUT RENSTRA DAN DIPA	21
BAB III	KAPASITAS ORGANISASI	24
	3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	24



	3.1.1	ANALISIS JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS PEGAWAI, PENDIDIKAN, USIA, GENDER DAN PETA JABATAN	25
	3.1.2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM	28
	3.2	SARANA PRASARANA	30
	3.3	DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN (DIPA)	34
	3.4	ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN	36
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA		38
	4.1	UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	38
	4.2	CAPAIAN KINERJA	42
	4.2.1	CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA	43
	4.2.2	CAPAIAN KINERJA ATAS RENSTRA DAN DIPA	44
	4.2.3	ANALISIS CAPAIAN KINERJA TERHADAP SASARAN KINERJA	49
	4.3	PERBANDINGAN KINERJA	52
	4.3.1	ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	52
	4.3.2	ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	53
	4.3.3	PERBANDINGAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA SETARA	57
	4.4	REALISASI ANGGARAN	59
	4.4.1	ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN TA 2023	60
	4.5	ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	62



	4.6	ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN	63
BAB V		PENUTUP	65
	5.1	SIMPULAN UMUM	65
	5.2	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN	66
	5.3	PERMASALAHAN	67
	5.4	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	68
		DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

2.1	Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.	13
2.2	Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur	14
2.3	PK Awal yang telah di tanda tangani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tahun anggaran 2023	18
2.4	PK Akhir yang telah di tanda tanagani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur TA 2023 setelah ada revisi pagu anggaran	19
2.5	Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA Tahun anggaran 2023	20
2.6	Indikator Sasaran Program, Kegiatan Dan Bobot Untuk Perhitungannya	21
2.7	Detail Bobot Untuk Perhitungan Capaian Kinerja Sampai Jenjang Komponen	22
2.8	Target tahun 2023 menurut Renstra disandingkan dengan DIPA	23
3.1	Daftar Pegawai yang ikut Dillat selama TA 2023	28
3.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN TA 2023	30
3.3	Histori DIPA	35
3.4	Rekap anggaran untuk Tenaga Ahli	36
4.1	Sandingan Penilaian Evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA TA 2020, 2021, 2022	39
4.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP 2022	40
4.3	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 2023	43



4.4	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA atas Target Renstra dan DIPA	44
4.5	Capaian 2 Proyek yang di klaim PPISDA	46
4.6	Cascading Perhitungan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA	47
4.7	Capain Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rincian Output	49
4.8	Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat SDA selama 4 Tahun Masa Periode Renstra	52
4.9	Perbandingan Capaina Kinerja dengan Target Jangka Menengah	53
4.10	Perbandingan Kinerja Antar Unit Kerja Setara	57
4.11	Realisasi Anggaran	59
4.12	Efisiensi Sumber Daya TA. 2023	61



DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Direktorat PPISDA	4
2.1	Rapat Pemberian Penjelasan dan Tinjauan Lokasi Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB	10
2.2	Rapat Pembahasan Pemanfaatan Bendungan Milik Kementrian PUPR untuk Pengembangan PLTS Terapung, Di RR Dirjen PI.	16
2.3	Rapat Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok	23
2.4	Rapat Pembahasan Reviu Final Business Case (FBC) Bendungan Bodri, Jawa Tengah	23
3.1	Rekapitulasi Pegawai	25
3.2	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	25
3.3	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Usia	26
3.4	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Gender	26
3.5	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Peta Jabatan	27
3.6	Ruang Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	34
3.7	Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA 20 MW Pada Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya Jawa Barat	37
4.1	Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Evaluasi AKIP PPISDA TA 2022	40





Bab I Pendahuluan

PENDAHULUAN

1

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyusun laporan kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang terukur (akuntabel) dan transparan.

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu prasyarat dalam menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya, hal tersebut dapat terwujud dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Semua penjabaran tersebut tertuang dalam beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden no 29 tahun 2014, Permen PANRB nomor 53 Tahun 2014, Permen PUPR nomor 09 tahun 2018 dan Permen PUPR nomor 23 Tahun 2020.

Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian SAKIP di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan, mengukur tingkat implementasi SAKIP, perbaikan manajemen kinerja serta memonitor tindak lanjut atas hasil rekomendasi periode sebelumnya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang kemudian di sebut Direktorat PPISDA menyusun laporan kinerja tahun 2022



sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang terukur (akuntabel) dan transparan. Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan tahun berikutnya

Rencana kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Direktorat ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi.

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Direktorat PPISDA diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mendukung tugas dan fungsi berdasarkan kepada anggaran yang telah tercantum dalam DIPA. Keseluruhan aktivitas yang dilakukan unit kerja yang menggunakan dana APBN di lingkungan pemerintahan wajib dipantau dimulai dari perencanaan berupa target-target yang hendak diraih baik target fisik maupun target keuangan, proses penyelenggaraan/ pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, capaian-capaian yang berhasil diraih baik secara fisik maupun secara keuangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja berikut tindak lanjut kinerja kedepannya. Keseluruhan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri / kepala lembaga / kepala daerah / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU bisa diprakarsai oleh Pemerintah maupun Badan Usaha. Apabila diprakarsai oleh Badan Usaha, Badan Usaha



tersebut harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai, serta proposal yang diajukan harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor dan kelayakan secara ekonomi maupun finansial. Adapun siklus proyek KPBK terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, persiapan proyek, transaksi, dan manajemen kontrak.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pasal 545, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat PPISDA yaitu sebagai berikut:

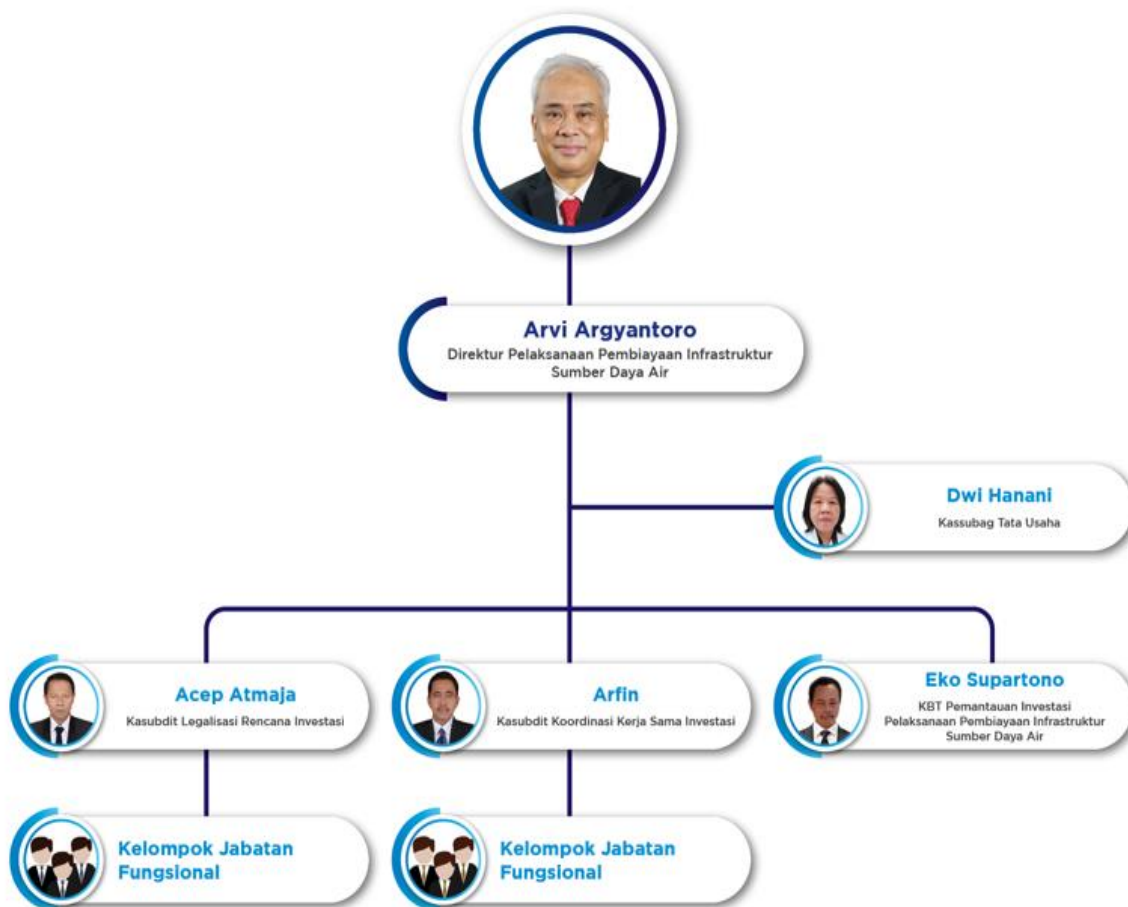
KEDUDUKAN:	TUGAS
Unit kerja Direktorat PPISDA dipimpin oleh Direktur PPISDA yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.	Direktorat PPISDA memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
FUNGSI:	
Direktorat PPISDA dalam melaksanakan tugas yang disebutkan di atas, dibutuhkan fungsi dalam menyelenggarakannya: - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air - penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan	



- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja terdiri atas 2 subdirektorat dan satusubagian tata usaha. Adapun 2 Subdirektorat tersebut yaitu Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. Berikut Struktur Organisasi Direktorat PPISDA:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Direktorat PPISDA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh:



1.1.1 Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
2. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
4. JF Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Ahli Pertama

1.1.2 Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi

Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Madya
2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. JF Pranata Humas Ahli Muda
4. JF Analis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Muda
5. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
6. JF Teknik Pengairan Ahli Pertama

1.1.3 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, koordinasi



data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.4 ISU STRATEGIS

Pada tahun ketiga Renstra 2020-2024, Direktorat PPISDA menghadapi berbagai isu-isu ataupun kendala dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut. Berikut ini merupakan isu-isu strategis pada Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023. Isu-isu dan kendala tersebut yaitu:

1. Dinamisasi alokasi anggaran Dit. PPISDA. Berdasarkan usulan anggaran TA. 2023 Dit. PPISDA mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,14 Miliar. Namun berdasarkan Pagu Indikatif Dit. PPISDA hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11,39 Miliar, sedangkan pada Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran mendapatkan anggaran sebesar 12,39 Miliar
2. Belum adanya kepastian kapasitas fiskal Ditjen. SDA untuk pembayaran Availability Payment (AP). Berdasarkan informasi dari Dit. SSPSDA, pada tahun 2026 Ditjen. SDA memiliki kapasitas fiskal untuk pembayaran AP sebesar Rp 800 M, namun akan terjadi peningkatan kebutuhan pembayaran AP pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran AP tersebut.
3. Belum terdapat studi terkait *Blended Finance* Proyek KPBU SDA. Dalam rangka mengurangi beban fiskal APBN dalam pembayaran AP, maka diperlukan kajian penggunaan blended finance dalam pemenuhan pembayaran AP
4. Pelaksanaan KPBU OP berdasarkan UU SDA 17/2019 Pasal 57 ayat (8) yang menyatakan bahwa kerja sama pendanaan tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk pelaksanaan KPBU sektor SDA.
5. Pada proyek KPBU yang memanfaatkan Bendungan Multiguna milik Kementerian PUPR untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, isu yang berkembang yaitu proses pengadaan BUP yang lama karena terdapat 2 tahap pengadaan yakni di Kementerian PUPR dan di PT PLN (Persero).

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun secara sistematis dan terstruktur mengacu pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor



88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada laporan kinerja Direktorat PPISDA TA 2023, diuraikan penjelasan dari masing-masing Bab dan Subbab. Berikut Sistematika laporan kinerja Direktorat PPISDA TA 2023:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dalam penyusunan laporan ini beserta dasar hukumnya, gambaran umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam Renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPISDA periode 2020 - 2024, Perjanjian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2023, dan target 2023 menurut Renstra dan DIPA.

BAB III Kapasitas Organisasi

Bab ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

BAB IV Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat PPISDA TA 2023, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja,

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor



pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.





Bab II Perencanaan Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

2

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah diamanatkan dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dibutuhkan sumber daya yang harus dapat berkolaborasi dan saling melengkapi. Ada 3 golongan sumber daya yang masuk dalam kapasitas organisasi ini, yaitu 1). Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas; 2). Sarana dan Prasarana ; dan 3). Anggaran yang telah disediakan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra Kementerian PUPR berkedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana dalam penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. Selain itu, Renstra Kementerian PUPR juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L juga dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran target tahunan RPJMN.

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen Renstra Kementerian dijabarkan ke dalam target tahunan yaitu Renja K/L dan kemudian dijadikan acuan di dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan. Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja sesuai dengan Renstra dan anggaran sesuai dengan DIPA.

Target di dalam Perjanjian Kinerja kemudian dijabarkan menjadi target bulanan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Kinerja dan akan dipantau serta dievaluasi setiap bulan yang tertuang di dalam dokumen Monev Kinerja Bulanan. Proses perencanaan kinerja tingkat kementerian di atas juga berlaku sama dengan lingkup di bawahnya, dari Unit



organisasi, unit kerja maupun satuan kerja. Dari kementerian kemudian akan turun ke unit organisasi, unit kerja kemudian ke satuan kerja jika ada. Adapun pada akhir tahun maka masing-masing pelaksana anggaran dari mulai tingkat kementerian, unit organisasi, maupun unit kerja akan disusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja akan membandingkan kinerja antara target yang telah tercantum di dalam Perjanjian Kinerja dengan capaiannya.

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur.



Gambar 2.1
Rapat Pemberian Penjelasan dan Tinjauan Lokasi
Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan
Infrastruktur PLTM Bintang Bano 6,3 MW, Kabupaten
Sumbawa Barat Provinsi NTB



Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Tujuan Direktorat PPISDA 2020-2024:

“Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Rangka Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air”

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu *major project* dengan indikasi pendanaan sebesar Rp 201, 5 Triliun yang dari jumlah tersebut sebesar Rp47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari *major project* ini adalah tersedia nyapasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang kemudian diperbarui karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kementerian sehingga pengaturan terkait pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan perlu diganti menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan terdiri atas : (1) Infrastruktur jalan (2) **Infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi**; (3) Infrastruktur air minum; (4) infrastruktur air limbah terpusat; (5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; (6) Infrastruktur system pengelolaan sampah; (7) Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan seperti pasar; (8) Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan; (9) Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; (10) Infrastruktur perumahan rakyat; (11) Infrastruktur bangunan negara berupa perkantoran, rumah negara dan sarana pendukung lainnya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan



tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan kedalam langkah-langkah yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan guna mempermudah pencapaian tujuan.

Sasaran kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 11 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek bendungan, 4 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
3. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Direktorat PPISDA perlu mendampingi dan membantu pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur SDA yang terdiri dari 6 proyek bendungan, 4 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi pada periode 2020-2024. Tidak hanya pemenuhan pembiayaan, Direktorat perlu memfasilitasi proyek KPBU. Fasilitasi dilakukan mulai dari tahap penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini berarti PPISDA tidak hanya memastikan biaya proyek terpenuhi, namun juga proyek yang dijalankan dengan skema KPBU perlu untuk didampingi hingga proses evaluasi. Selain itu, pelayanan perkantoran juga penting untuk diperhatikan. Layanan perkantoran perlu dilaksanakan untuk memastikan operasionalisasi berjalan.

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur sumber daya air melalui skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA perlu melaksanakan tiga poin yang tercantum dalam sasaran yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan sasaran membutuhkan arahan kebijakan dan strategi agar tugas dan fungsi direktorat tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan (terkait arahan kebijakan dan strategi akan dijelaskan pada bab selanjutnya). Jika pelaksanaan fasilitasi proyek KPBU, pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek, dan pelayanan perkantoran dapat dicapai, maka Direktorat PPI SDA telah mampu mendukung pemenuhan infrastruktur SDA.



Detail manual Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan persentase perhitungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ikut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung Sistem Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator Kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan Pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan		Internal dan Eksternal



				KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		
--	--	--	--	---	--	--

Tabel 2.2
Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program 1
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SK 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	komposit dari indikator 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur (%) 2. Tingkat Implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air (%)	IKSP2, dihitung Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) 2. Jumlah paket KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksternal

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 2020-2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ikut berkontribusi



dalam mencapai target Sasaran Program seperti yang terlihat pada tabel kinerja yang terdapat Sasaran Program 1, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang mana turunannya adalah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Indikator 2 pada Sasaran Program dengan nilai bobot sebesar 70 %, maka turunannya terdapat pada indikator 2 yang ada di Sasaran Kegiatan Direktorat PPSIDA dengan bobot nilai sebesar 50 %. Dimana dalam 50 % ini adalah nilai dari paket KPBU yang siap dikerjasamakan.

2.1.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- c) Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- e) Percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- f) Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air;
- g) Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU;

2.1.3 Strategi

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPK untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- d) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;



- e) Mengembangkan system teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
- g) Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik;
- h) Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat.
- i) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- j) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
- l) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konsevasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategi

Gambar 2.2

Rapat Pembahasan Pemanfaatan Bendungan Milik Kementrian PUPR untuk Pengembangan PLTS Terapung, Di RR Dirjen PI.



Jenderal Pembiayaan Infrastruktur). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur

Sumber Daya Air selama satu tahun kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Dokumen PK disusun setelah adanya alokasi pagu anggaran yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar Dokumen PK yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada. Penetapan PK awal juga telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya sebagai baseline capaian pada tahun berjalan dan selaras dengan rencana yang tertuang dalam Renstra Direktorat PPISDA periode 2020-2024. Dokumen PK juga dijadikan panduan pegawai dalam Menyusun SKP (Standar Kinerja Pegawai), dari tingkat eselon dua yang kemudian diturunkan kepada jenjang dibawahnya. dimana akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran berjalan.

Tabel 2.3
PK Awal yang telah di tanda tangani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tahun anggaran 2023

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET PK 2023
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	102,37%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25%	25%
Pagu Anggaran: Rp 12.399.643.000,00		

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada awal tahun 2023 telah menetapkan perjanjian kinerja yang mencakup 1 sasaran kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 12.399.643.000.000,00 Sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 033.16.1.631003/2023 tanggal 30 Nopember 2022.



2.2.2 Perjanjian Kinerja Akhir

Perjanjian Kinerja antara Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang ditandatangani pada bulan Desember 2023. Revisi PK terjadi karena adanya perubahan pagu anggaran pada beberapa Rincian output, sehingga menyebabkan perubahan pagu anggaran secara keseluruhan. Pada PK revisi juga terdapat detail indikator kinerja beserta targetnya. Berikut perubahan yang terjadi pada PK Revisi:

Tabel 2.4
PK Akhir yang telah di tanda tanagani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur TA 2023 setelah ada revisi pagu anggaran

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2022	TARGET PK 2023
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	102,37%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Dengan indikator: 1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA 2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA 3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA 4. Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA 5. Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan 6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 7. Layanan Perkantoran	25%	25%
Pagu Anggaran: Rp 11.199.643.000,00		



2.2.3 Revisi Perjanjian Kinerja

Selama tahun 2023, Direktorat PPISDA telah mengalami 2 kali revisi DIPA dan PK. Revisi PK dilakukan karena ada beberapa perubahan yang terjadi. Berikut history revisi PK yang dilakukan Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023:

Tabel 2.5
Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA Tahun anggaran 2023

NO	History	Time	Pagu (Rp)	Keterangan
1	PK Awal	Januari 2023	12.399.643.000,00	PK awal sesuai dengan anggaran awal yang ada di DIPA awal
2	PK Revisi 1	November 2023	12.399.643.000,00	Revisi PK 1, memasukkan indikator kinerja kedalam PK yang mana pada PK awal indikator ini belum tertuang dalam PK.
3	PK Revisi 2	Desember 2023	11.199.643.000,00	Optimalisasi anggaran, terjadi perubahan pagu dipa di akhir tahun.

2.3 METODE PENGUKURAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang akan dicapai.

Indikator kegiatan (Output) merupakan indikator yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dalam capaian kinerja dan output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah untuk diukur, mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan. Indikator Kinerja Utama Output Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA;
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
4. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
5. Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan;
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA;
7. Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA.



Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat PPISDA berpedoman pada perhitungan yang terdapat dalam Tabel Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tahun 2020 - 2024. Sasaran Kegiatan yang ada di Renstra DJPI saling terintegrasi dari Unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, sehingga mengakibatkan adanya sharing dalam pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut ini adalah Tabel Indikator Sasaran Kegiatan dan Cara Perhitungannya berdasarkan Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Sasaran Program, Kegiatan Dan Bobot Untuk Perhitungannya

SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Komposit dari indikator-indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA sbb:
			1. Tingkat Implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan Infrastruktur SDA (%)	Indikator 1 (50%) : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan SDA yang disusun dibandingkan dengan target
			2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur SDA	Indikator 2 (50%) : Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target <i>(Sumber Renstra DJPI)</i>

Selanjutnya tabel 2.7 dijabarkan kembali mengenai bobot perhitungan capaian setiap Rincian output dan komponennya. Berikut bobot perhitungan capaian kinerja terlampir dalam tabel 2.7:

Tabel 2.7
Detail Bobot Untuk Perhitungan Capaian Kinerja Sampai Jenjang Komponen

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	RINCIAN OUTPUT	BOBOT RO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN
SASARAN PROGRAM:					
MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
IKSP:					
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung system, kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif					
Sasaran Kegiatan:					



Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
Indikator Kinerja Kegiatan:					
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA Target 25%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA yang disusun dibandingkan dengan target (50 %)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	30 %	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	50%
				Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	50%
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	20 %	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	100%
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	30%	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%
				Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA – rp	60%
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	20%	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	
		NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	-	-	
	Jumlah Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target (50%)	Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan	35%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	60%
				Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%
		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	35%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%
		Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	30%	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%

2.4 Target Tahun 2023 Menurut Renstra dan DIPA

Pada tahun anggaran 2023 Direktorat PPISDA memiliki target renstra sebanyak 19 target dengan perincian: 10 rekomendasi kebijakan, 2 dokumen, 2 kesepakatan, 2 NSPK dan 5 laporan dengan rencana anggaran dalam renstra sebesar Rp 43.550.000.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam dokumen DIPA, jumlah target sebanyak 18 target dengan perincian: 6 rekomendasi kebijakan, 1 dokumen, 5 kesepakatan, dan 4 laporan dengan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp 11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berikut tabel sandingan target renstra dan target DIPA tahun anggaran 2022 Direktorat PPISDA:



Tabel 2.8
Target tahun 2023 menurut Renstra disandingkan dengan DIPA

NO	SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	SAT	TARGET RENSTRA	PAGU	TARGET DIPA	PAGU DIPA AKHIR
SASARAN PROGRAM:						
MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
IKSP:						
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung system, kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif						
Sasaran Kegiatan:						
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA						
Indikator Kinerja Kegiatan :						
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA						
PELAKSANA :						
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA						
OUTPUT KEGIATAN						
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		3	4.725	2	1.650
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	1	700	1	1.150
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	RK	3	4.025	1	500
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	2.400	1	1.750
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	RK	2	2.400	1	1.750
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		4	23.600	2	2.640
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	2	20.000	1	1.640
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	1	3.600	1	1.000
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		1	1.000	1	1.680
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	RK	1	1.000	1	1.680
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		2	5.500	5	2.199
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	DOK	2	2.600	1	1.000
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	KS	2	2.900	5	1.099
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	1.800	-	-
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSP K	2	1.800	-	-
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan		4	3.800	4	950



Pembiayaan SDA						
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	4	3.800	4	950
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		1	300		
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	1	300		
TOTAL			19	47.290	16	10.199

Gambar 2.3

Rapat Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Proyek KPB Unsolicted Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok



Gambar 2.4

Rapat Pembahasan Reviu Final Business Case (FBC) Bendungan Bodri, Jawa Tengah





BAB III

Kapasitas Organisasi

Kapasitas Organisasi

3

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah diamanatkan dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dibutuhkan sumber daya yang harus dapat berkolaborasi dan saling melengkapi. Ada 3 golongan sumber daya yang masuk dalam kapasitas organisasi ini, yaitu 1). Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas ; 2). Sarana dan Prasarana ; dan 3). Anggaran yang telah disediakan untuk dikelola.

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Usaha Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pokok-Pokok Kepegawaian juga disebutkan dalam undang-undang di maksud di mana perlu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

Dalam mencapai tujuan di atas, dibutuhkan sebuah sistem untuk pengelolaan pegawai Negeri sipil yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

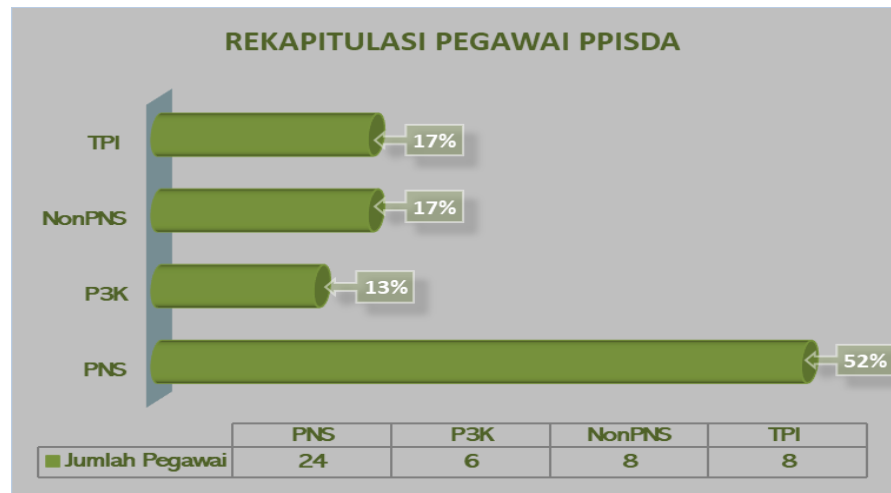
Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyusunan roadmap pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur. Hal demikian selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo agar pada Pegawai Negeri Sipil membudayakan core value Aparatur Sipil Negara (ASN), BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai dasar ini



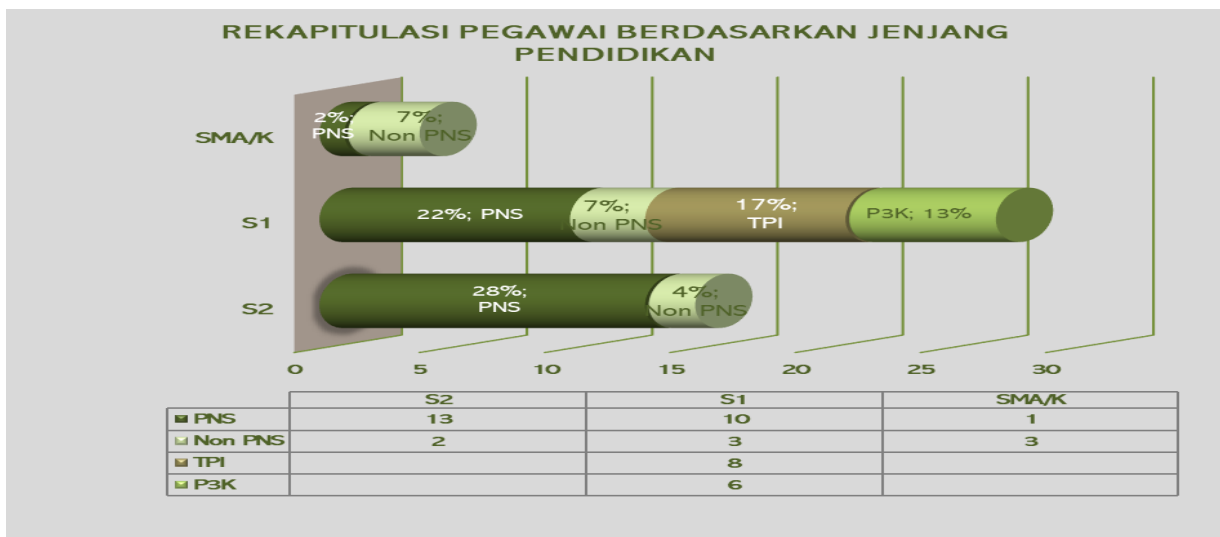
diharapkan mampu menciptakan generasi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat berkarya, berkualitas serta profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Usia, Gender dan Peta Jabatan

Jumlah Pegawai Direktorat PPISDA selama TA 2023 sebanyak 46 orang, terdiri dari 24 orang PNS, 6 orang P3K, 8 orang NonPNS dan 8 orang TPI. Berikut ini rekapitulasi pegawai Direktorat PPISDA berdasarkan status pegawai:



Gambar 3.1 Rekapitulasi Pegawai

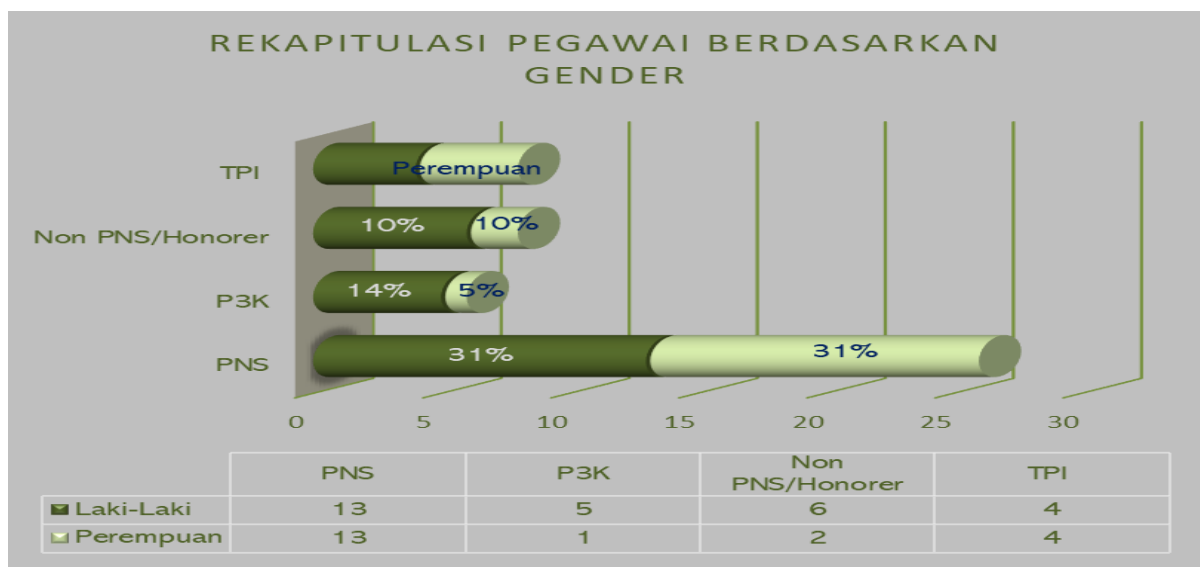


Gambar 3.2 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan





Gambar 3.3 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Usia

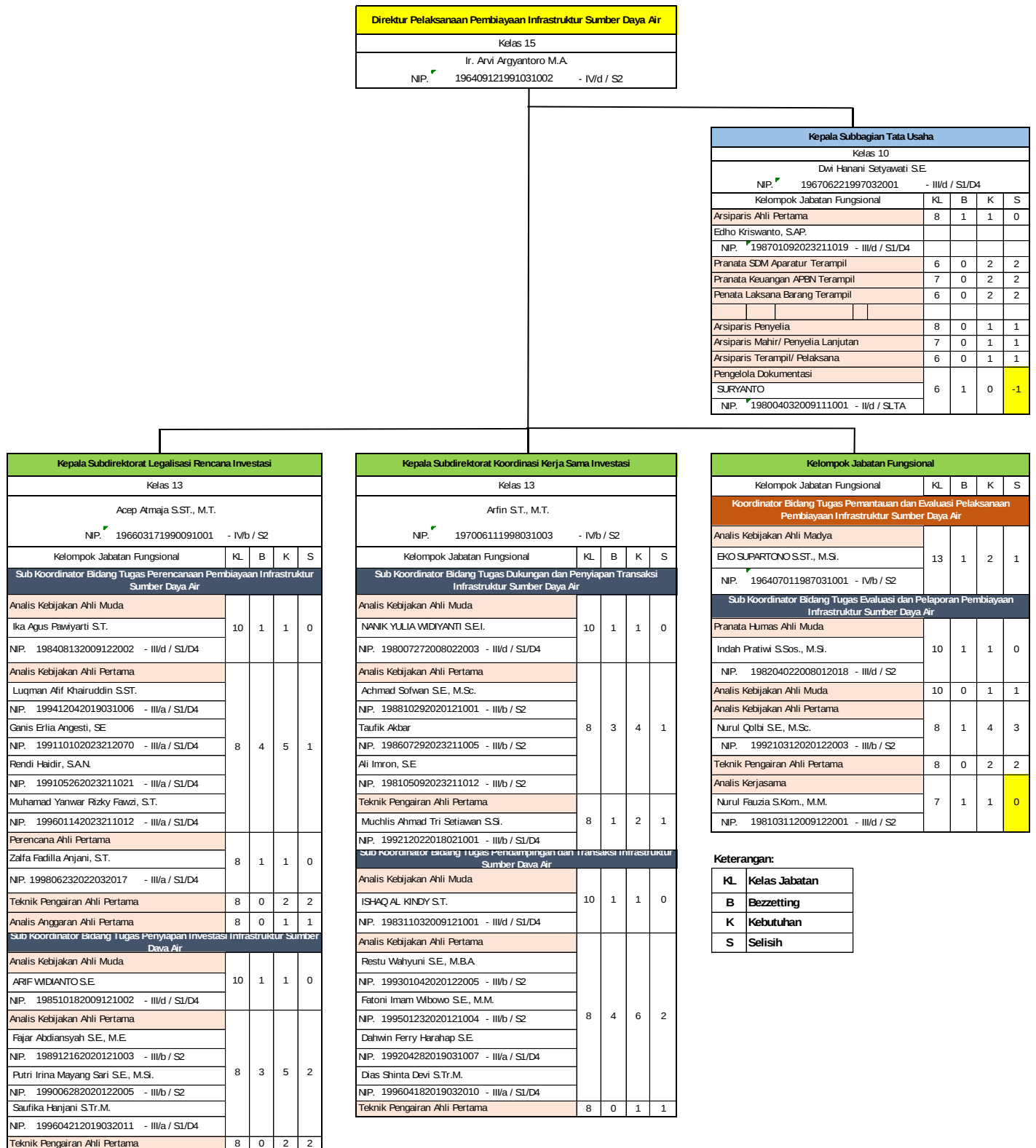


Gambar 3.4 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Gender

Berdasarkan pembahasan pemetaan pegawai terkait kebutuhan, bezzeting, dan formasi PNS, kebutuhan pegawai berdasarkan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber daya Air sebanyak 53 orang. Jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan sebanyak 24 orang, masih ada selisih sebesar 29 orang. Kebutuhan jabatan fungsional saat ini dibantu oleh NonPNS Substansi dan Pendukung. Detail peta jabatan dari masing-masing bagian terlampir pada tabel brerikut ini:



PETA JABATAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR



Gambar 3.5 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Peta Jabatan



Pada peta jabatan di atas dapat dilihat gambaran kebutuhan pegawai dan selisih pada setiap bagian. Untuk mencapai tugas dan fungsi yang ada pada masing-masing bagian, telah di jabarkan kebutuhan pegawai dengan rincian jabatan fungsional dan kelas jabatannya. Pada tabel tersebut 2 pegawai yang tidak sesuai nomenklatur yang dibutuhkan pada bagian tersebut, Sehingga di sarankan untuk tahun anggaran selanjutnya dilakukan revisi nomenklatur terhadap peta jabatan tersebut. karena jafung tersebut tidak sesuai dengan pegawai yang bersangkutan. Saat ini pada bagian tata usaha terdapat 6 pegawai yang statusnya masih Non PNS. Namun, ke depannya diharapkan tahun berikutnya pada bagian ini kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan di samping dapat terpenuhi, sehingga bagian tata usaha bisa melakukan tugasnya dengan maksimal, efisien dan efektif.

3.1.2 Peningkatan kapasitas SDM

Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, selama tahun 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

Pada Tahun 2023, sebanyak 16 ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Berikut ini daftar pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun Anggaran 2023:

Tabel 3.1
Daftar Pegawai yang Ikut Diklat selama TA 2023

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat
1	Ir. Arvi Argyantoro, MA	a. Leadership Lecture Enterpreneurship Penyelenggaraan Infrastruktur Publik b. Pelatihan Asesor Kompetensi c. Manajemen Pengembangan Sdm
2	Acep Atmaja, S.St, MT.	a. Leadership Lecture Enterpreneurship Penyelenggaraan Infrastruktur Publik b. Pelatihan Asesor Kompetensi
3	Arfin, St, Mt	a. Leadership Lecture Enterpreneurship Penyelenggaraan Infrastruktur Publik
4	Nanik Yulia Widiyanti, S.E.I	a. Pelatihan Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis b. Workshop Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian



		Pupr c. Manajemen Pengembangan Sdm
5	Ika Agus Pawiyarti, ST	Pelatihan Training Of Trainers (Tot) Mengajar Tahun 2023
5	Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si.	a. Pelatihan Teknis Pengelolaan Komunikasi Krisis
		b. Workshop Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pupr
		c. Pelatihan Training Of Trainers (Tot) Mengajar Tahun 2023
6	Saufika Hanjani, S.Tr.M	<i>Webinar Empowering Young Leaders For Sustainable Toll Road Business Growth</i>
7	Muchlis Ahmad Tri S, S.Si	Course Certified Ppp Professional (Cp3p) - Execution
8	Fajar Abdiansyah, Se., M.E.	a. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		b. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
		c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 Dan Uji Sertifikasi
		d. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Pbj)
		e. Fungsional Analisis Kebijakan
9	Putri Irina Mayang Sari, S.E., M.Si	a. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		b. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
		c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 Dan Uji Sertifikasi
		d. Tantangan Implementasi Mekanisme Kpbu Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jembatan (Callender Hamilton)
		e. Webinar Empowering Young Leaders For Sustainable Toll Road Business Growth
10	Dias Shinta Devi, S.Tr.M	a. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		b. Diklat Fungsional Calon Analis Kebijakan
		c. Webinar Pengembangan Sistem Drainase, Irigasi, Dan Penanggulangan Banjir Pada Lahan Pasang Surut
		d. Tantangan Implementasi Mekanisme Kpbu Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jembatan (Callender Hamilton)
		e.
11	Achmad Sofwan, S.E, M.Sc	f. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah



		g. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 Dan Uji Sertifikasi
		h. Tantangan Implementasi Mekanisme Kpbu Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jembatan (Callender Hamilton)
12	Restu Wahyuni, S.E., M.B.A.	i. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		j. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
13	Christy J. Sinuraya, S.E., M.Si.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 Dan Uji Sertifikasi
14	Fatoni Imam Wibowo, S.E., M.M.	a. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		b. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
15	Nurul Fauzia, MM	Manajemen Pengembangan SDM
16	Nurul Qolbi, S.E., M.Sc.	a. Webinar Utilization Of Water Resources Information System (Wris) In Integrated Flood Control
		b. Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
		c. Tantangan Implementasi Mekanisme Kpbu Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jembatan (Callender Hamilton)

3.2 SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja sesuai dengan target. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap unit organisasi/kerja. Apabila sarana dan prasana tidak tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Berikut ini adalah Sarana dan Prasaran yang tersedia di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Tabel 3.2
Daftar Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN TA 2023

NO	NAMA BARANG	Jumlah	KONDISI
----	-------------	--------	---------



1	Lemari Besi/Metal Merek ALBA SD-203	10	Baik
2	Lemari Besi/Metal Merek Dankha FC-G6 Lemari Tinggi Pintu Kaca	10	Baik
3	Rak Kayu Merek Enzo SPSHELF HPL TACO TH123AA	8	Baik
4	Filing Cabinet Besi Merek ALBA FC-104	7	Baik
5	Filing Cabinet Besi Merek Elite B 44 -08 DX	8	Baik
6	Filing Cabinet Besi Merek Dankha D-A4 Lemari Filling Cabinet 4	8	Baik
7	Alat Penghancur Kertas Merek GEMET 320 C	6	Baik
8	LCD Projector/Infocus Merek Sony Projector (VPL-DX142)	1	Baik
9	LCD Projector/Infocus Merek Infocus Projector	1	Baik
10	Acces Control System Merek RS-232-Wirgrand	1	Baik
11	Focusing Screen/Layar LCD Projector Merek Layar Microvision 120"	1	Baik
12	Meja Kerja Kayu Merek Enzo MKM 160	1	Baik
13	Meja Kerja Kayu Merek Enzo MKM 130	1	Baik
14	Meja Kerja Kayu Merek Enzo MJS 120	3	Baik
15	Meja Kerja Kayu Merek Enzo Staf 120x75x75	13	Baik
16	Meja Kerja Kayu Merek Meja Kerja Partisi 4 Org	2	Baik
17	Meja Kerja Kayu Merek Custom 618 WG Maple O	1	Baik
18	Kursi Besi/Metal Merek Kursi Besi Enzo Cubics SS1 hitam 47x50x90	2	Baik
19	Meja Rapat Merek Enzo 380x150x75	1	Baik
20	Meja Rapat Merek Meja Rapat Enzo Meeting HPL Taco 123AA	1	Baik
21	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha D9005 AL CPT	1	Baik
22	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha Ortiz I TC	4	Baik
23	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha 9008 AL CPT	7	Baik

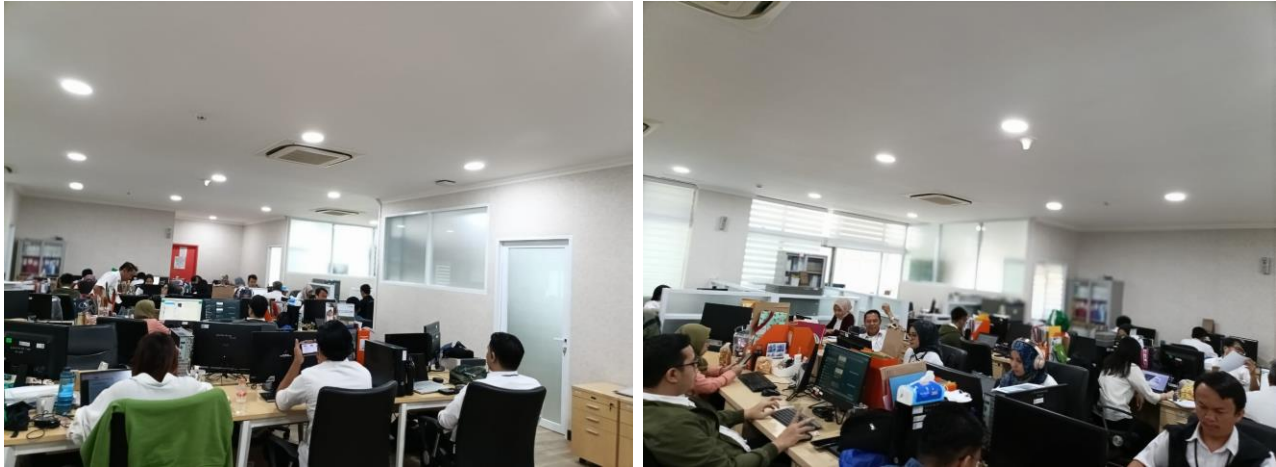


24	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha D 510 CR	8	Baik
25	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha Mattea I TC CHR	18	Baik
26	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Dankha Brizio II AL TC	1	Baik
27	Kursi Fiber Glas/Plastik Merek Kursi Dankha 56101700 HD 630U	4	Baik
28	Nakas Merek Merk Enzo CR 160x40x80	1	Baik
29	Meubelair Lainnya Merek Enzo Lux1 Sf1 90x75x70 hitam	2	Baik
30	Air Cleaner Merek Daikin MC30VVM-H Air Purifier	1	Baik
31	A.C. Sentral Merek Daikin 3.5	1	Baik
32	A.C. Sentral Merek Daikin 2Pk	2	Baik
33	A.C. Sentral Merek Daikin 2.5	2	Baik
34	A.C. Split Merek Daikin 1 Pk	3	Baik
35	A.C. Split Merek Daikin 1.5 Pk	3	Baik
36	Exhaust Fan Merek Exhaust Fan	1	Baik
37	Exhaust Fan Merek PANASONIC	2	Baik
38	Televisi Merek Panasonic TH-32D302G LED TV 32 Inch	1	Baik
39	Televisi Merek Samsung 49 inch Led	1	Baik
40	Televisi Merek TV Samsung smart 60inch UHD standing bracket	1	Baik
41	Camera Digital Merek FujiFilm Mikrrorless X-A5 Kit 15-45mm Silver	1	Baik
42	Camera Conference Merek Kamera Teleconference BCC950	7	Baik
43	P.C Unit Merek Dell Inspiron AIO 5490 i7 10510U 8gb	1	Baik
44	Note Book Merek Dell XPS 13	1	Baik
45	Note Book Merek Asus ZenBook	2	Baik
46	Note Book Merek Asus Zenbook Flip Ux363ea Oled Evo i7 Touch	1	Baik
47	Note Book Merek Axioo Notebook MyBook Pro K7 16n9	1	Baik



48	Tablet PC Merek Tab S4 64GB/4GB-Grey	1	Baik
49	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek HP LaserJet Pro 400 M451nw	1	Baik
50	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek HP LaserJet Pro P1102	1	Baik
51	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek Hp Laserjet proM15w	1	Baik
52	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek Epson EcoTank L13110	1	Baik
53	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek Brother Color Laser Printer HL-L8260CDN	1	Baik
54	Printer (Peralatan Personal Komputer) Merek Brother Mono Laser Printer HL 1201	2	Baik
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Merek Avison AV176U Sheetfed Scanner	1	Baik





Gambar 3.6 Ruang Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan tahun anggaran 2023 Nomor: DIPA-033.16.1.631003/2023, tanggal 30 November 2022, Pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebesar Rp11.399.643.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan 6 Output kegiatan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA, Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA serta Layanan Perkantoran yang anggarannya masuk ke dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Sehingga total anggaran yang di Kelola Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Berikut ini tabel rincian anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar Rp12.399.643.000,00 (dua belas milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).



Tabel 3.3
Histori DIPA

NO	History	Waktu Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	30 November 2022	12.399.643.000,00	Pertama kalinya DIPA terbit
2	Revisi 1	20 Februari 2023	12.399.643.000,00	Pergeseran anggaran antar Rincian Output, namun tidak merubah total pagu secara keseluruhan.
3	Revisi 2	9 November 2023	11.199.643.000,00	Optimalisasi Anggaran

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran Direktorat PPISDA bersama Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Setditjen PI pada tanggal 6 Oktober 2023, terlampir kronologis perubahan anggaran tersebut:

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk RO Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan TA 2023 yang semula Rp 3.599.643.000 dengan realisasi sebesar 23,94 %, diusulkan untuk direalokasi menjadi Rp 2.199.643.000 dengan target realisasi sebesar 99%. Sehingga terdapat potensi anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.400.000.000,00 dengan rincian Rp600.000.000 dari Sub Komponen (Paket Kegiatan) Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2023, dan Rp800.000.000 dari Sub Komponen Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Lainnya TA. 2023.
2. Hal yang menjadi penyebab terdapat potensi anggaran yang tidak terserap sebagaimana dimaksud pada poin 1, yaitu mundurnya jadwal lelang proyek KPBU sektor SDA sebanyak 5 (lima) proyek pada TA. 2023, hanya proyek KPBU PLTA Tigadihaji yang sudah memasuki tahap transaksi. Proyek KPBU HLD WS Lombok dan Proyek KPBU Bendungan Merangin masih dalam tahap persiapan, sedangkan untuk Proyek KPBU PLTA Leuwikeris dan Proyek KPBU DI Komering direncanakan akan dilakukan pengumuman prakualifikasi pada bulan Desember 2023.
3. Mengingat 1 dan 2 poin tersebut di atas, maka Direktorat PPISDA akan melakukan realokasi potensi anggaran tidak terserap tersebut ke KRO ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp200.000.000 dan sisanya



Rp1.200.000.000 ke Setditjen PI.

4. Untuk anggaran yang akan di realokasi ke KRO ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp200.000.000 akan digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pelaksanaan Workshop ke-4 Sub Tema *Water and Innovative Financing, World Water Forum (WWF) 10th*.

3.4 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Pada dasarnya hubungan anggaran dengan Sumber daya manusia berhubungan erat dengan gaji dan tunjangan pegawai yang menjadi bagian besar dari pagu anggaran suatu kementerian. Oleh karena itu, jumlah sumber daya manusia yang diperlukan akan mempengaruhi seberapa besar alokasi anggaran yang harus disediakan.

Tabel 3.4
Rekap Anggaran untuk Tenaga Ahli

Jumlah Pegawai	Pagu Anggaran	Anggaran Tenaga Pendukung Individual	Anggaran Konsultan Expert
46	11.199.643.000,00	957.200.000,00	1.839.000.000,00
		9%	16%

Direktorat PPISDA bukanlah unit kerja yang mempunyai output berupa layanan kebutuhan pegawai secara dasar. Namun, setelah dilakukan pemetaan pegawai terdapat gap akan Kebutuhan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat PPISDA mengalokasi anggaran untuk mengadakan pegawai kontrak sebesar 9% untuk anggaran tenaga pendukung individual setara dengan Rp 957.200.000,00 dan Tenaga untuk Konsultan Expert sebesar 16% setara dengan Rp 1.839.000.000,00. Tenaga tambahan ini ditempatkan pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan.



Gambar 3.7
Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA 20 MW Pada Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya Jawa Barat





BAB IV

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

4

Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud akuntabilitas kinerja instansi/organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

4.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pada Tahun 2023 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per Quartal bersama unit kerja di Lingkungan DJPI, Narasumber dari Bappenas dan Inspektorat Jenderal serta Penanggung dari Biro PHKLN dan BPIW. Selain itu juga dilakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan.

Penerapan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan sesuai standar dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, upaya peningkatan SDM juga dilakukan melalui mengikutkan pegawai untuk mengikuti workshop penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan DJPI pada 27 Oktober 2023 dan workshop tata cara penyelenggaraan evaluasi SAKIP berdasarkan Permen PANRB No.88 Tahun 2021! Pada 16 Maret 2023.

Berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat PPISDA telah menindaklanjutinya. Pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, rekomendasi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah mendorong pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-SAKIP dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dit.PSSPP, DJPI dalam mengembangkan aplikasi e-SAKIP

Berdasarkan surat no PR.0304-PM/296 tanggal 13 Juni 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2022, yang bertindak selaku Evaluator adalah Petugas SAKIP dari Direktorat Pelaksanaan



Pembiayaan Permukiman didapatkan hasil evaluasi terhadap SAKIP Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Sandingan Penilaian Evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA TA 2020, 2021, 2022

NO	KOMPONEN	BOBOT/ NILAI MAKS	NILAI HASIL EVALUASI TA. 2020	NILAI HASIL EVALUASI TA. 2021	BOBOT/ NILAI MAKS	NILAI HASIL EVALUASI TA. 2022
		Permen PAN RB no 12 th 2015			Permen PAN RB no 88 th 2021	
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	25,23	27,89 %	30	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,73	19,69 %	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,8	12,39 %	15	12,00
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	6,75	6,88 %	25	21,00
I	Capaian Kinerja	20 %	12,22	12,01 %		
	TOTAL	100 %	76,74	78,86 %		84,01

Pada tabel 4.1 terdapat sandingan penilaian evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA selama 3 tahun terakhir. Dalam tabel tersebut dapat dilihat peningkatan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat PPISDA selama 3 tahun. Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2020 dengan nilai 76,74 point, tahun 2021 meningkat +2,12 point yaitu dengan nilai 78,86%. Selanjutnya, pada tahun 2022 nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat PPISDA sebesar 84,01% dengan predikat BB (sangat baik) meningkat +5,15 point.

Pada tanggal 24 Juli 2023, Direktorat PPISDA juga telah menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Evaluasi AKIP TA 2022 dalam rangka menindaklanjuti hasil dari evaluasi tersebut. dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait strategi dalam menindaklanjuti rekomendasi dari evaluator sebagaimana Gambar 4.1 berikut.





Gambar.4.1
Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut Evaluasi AKIP PPISDA TA 2022

Direktorat PPISDA juga telah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh evaluator pada saat evaluasi AKIP. Berikut terlampir rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan:

Tabel 4.2.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP 2022

➤ HASIL EVALUASI AKIP DIREKTORAT PPISDA			
No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	-	-
2	Pengukuran Kinerja	Agar mendorong dikeluarkan aturan terkait Reward and Punishment berdasarkan capaian kinerja di lingkungan Kementerian PUPR.	1. Pada tahun 2023 Telah dilakukan koordinasi dengan Sekdijen PI selaku unit eselon I. Dan dikoordinasikan dengan pihak BPSDM PUPR. 2. Pada tanggal 14 Desember 2023 telah di tanda tangani SE 23/SE/M/2023 tentang Pengelolaan Kinerja ASN di Kementerian PUPR. Pada point J, K, L tertera terkait reward n punishment ASN. Dan aturan akan berlaku per 1 januari 2024.
3	Pelaporan Kinerja	⇒ Agar menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku ⇒ Agar pada laporan kinerja tahun berikutnya menyajikan	1. Telah diupayakan laporan kinerja di upload dengan tepat waktu 2. Pada laporan kinerja tahun anggaran 2023, telah di lampirkan sandingan capaian antar unit kerja



		perbandingan capaian antara unit kerja sebagai Benchmark	yang setingkat.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Mendorong penerapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja berbasis aplikasi yang dikoordinir oleh Biro PAKLN	Berkordinasi dengan Direktorat PSPP selaku kordinator SAKIP DJPI, untuk mendorong pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-SAKIP.

⇒ HASIL EVALUASI AKIP DJPI

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Pimpinan DJPI telah terlibat dalam Perencanaan Kinerja, namun belum efektif dimana masih diperlukan adanya keikutsertaan dalam hasil pemantauan capaian kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah disusun, dan diperlukan adanya pemantauan secara berkala serta reviu atau verifikasi secara berjenjang atas capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi, sehingga Rencana Aksi dapat berjalan secara dinamis Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan terkait substansi dokumen perencanaan kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.	⇒ Direktorat PPISDA telah melakukan koordinasi internal terkait pembahasan capaian kinerja setiap bulannya dengan menyelenggarakan rapat internal setiap minggu pertama di RR Direktorat PPISDA. Salah satu contohnya pada tanggal 6 Oktober 2023, Rapat Pembahasan Monev setiap bulann Oktobe Direktorat PPSIDA TA 2023. ⇒ Direktorat PPISDA telah melakukan pengadministrasian terkait bukti dukung seluruh rapat pembahasan dokumen perencanaan kinerja dengan melibatkan pimpinan berupa Nota Dinas dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
2	Pengukuran Kinerja	⇒ Menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian output masing-masing kegiatan dalam Laporan Monev Bulanan maupun e-Monitoring, sehingga mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin	⇒ Direktorat PPISDA telah menyajikan persentasi capaian output dengan menggunakan perhitungan yang relevan, setiap bulannya dihitung menggunakan cascading perhitungan capaian. Dan tabel ringkasannya selalu di lampirkan dalam laporan monev bulanan dan juga diinput ke dalam aplikasi iemonitoring.



		diwujudkan ⇒ Laporan Monev Bulanan belum menyebutkan hasil tindak lanjut bulan sebelumnya sehingga tidak dapat diketahui tingkat efektifitas pelaksanaan rencana tindak lanjut bulan sebelumnya. ⇒ Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev Bulanan.	⇒ Pada laporan monev bulan Juli 2023 Direktorat PPISDA telah melampirkan permasalahan dan tindak lanjut dari bulan sebelumnya, bulan berjalan dan rencana tindak lanjut di bulan selanjutnya. Hal tersebut tercantum dalam Bab III laporan Monevnya. ⇒ Dalam penyusunan laporan monev bulanan Direktorat PPISDA telah menggunakan Lembar Kendali sebagai bukti dukung bahwa monev bulanan telah di review dan di setujui oleh pimpinan secara berjenjang.
3	Pelaporan Kinerja	⇒ Mengikutsertakan Tim Evaluator Internal dalam Diklat/ Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait. ⇒ Berkoordinasi dengan Biro PAKLN dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan evaluasi internal maupun unit organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Direktorat PPISDA telah mengirimkan perwakilannya (TIM SAKIP Direktorat PPISDA) untuk mengikuti Workshop SAKIP DJPI pada tanggal 27 Oktober 2023 yang mengundang narasumber dari: Kementerian PAN dan RB, BPKP, Biro PAKLN dan BPIW. Seluruh Peserta Workshop mendapatkan Surat Keterangan bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut

4.2 CAPAIAN KINERJA

Pada tahun ke empat periode Renstra 2020-2024, Direktorat PPISDA memiliki 1 (satu) Indikator kinerja sasaran program, yaitu: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Kemudian diturunkan ke renstra masing-masing unit kerja, Indikator kinerja pada Direktorat PPISDA.

Pada perjanjian kinerja Direktorat PPISDA TA. 2023, tercantum target kinerja



berdasarkan indikator kinerja sasaran kegiatan diantaranya:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA
4. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
5. Proyek KPBU SDA yang siap di kerjasamakan
6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
7. Layanan Perkantoran

4.2.1 CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023 berdasarkan target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Capaian Kinerja Direktorat PPISDA berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 2023

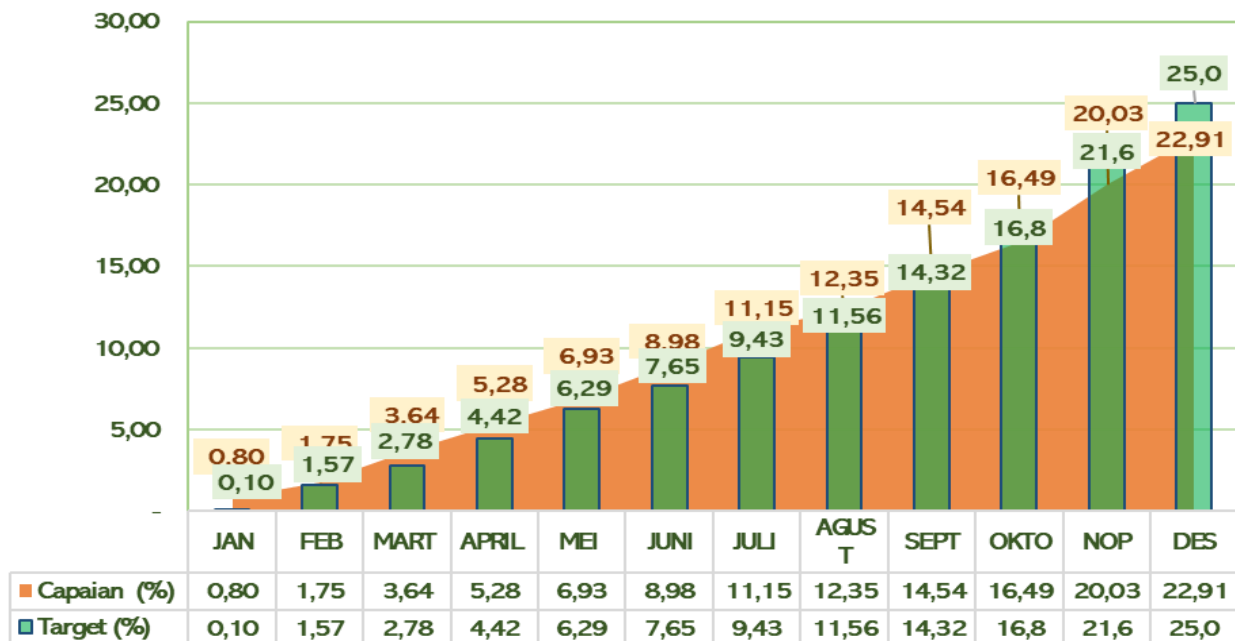
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET PK	CAPAIAN KINERJA PK	DEVIASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	%	25	22,91	2,09

Secara keseluruhan, keberhasilan akan capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun anggaran 2023 didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan, yakni tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan target sebesar 25%. Pada tabel 4.3 dapat dilihat Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2023 ini telah mencapai 22.19%. Perhitungan capaian kinerja tersebut telah di hitung rutin setiap bulannya dalam cascading perhitungan capaian kinerja dengan cara mengalikan capaian bulanan dengan bobot yang ada pada Renstra DJPI.

Berikut ini grafik kronologis capaian kinerja Direktorat PPISDA setiap bulan disandingkan dengan target capaiannya selama tahun anggaran 2023:



Progres Capaian Kinerja Terhadap Target PK selama TA 2023



Grafik. 4.1

Kronologis capaian kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023

4.2.2 CAPAIAN KINERJA ATAS RENSTRA DAN DIPA

Terdapat perbedaan target pada Renstra Direktorat PPISDA 2020-2024 dan target pada DIPA Direktorat PPISDA 2020 TA 2023. Beberapa Rincian Output yang memiliki perbedaan target pada Renstra dan DIPA adalah sebagai berikut:

Berikut ini merupakan sandingan tabel target capaian kinerja PPISDA antara renstra dengan DIPA TA. 2023:

Tabel 4.4
Capaian Kinerja Direktorat PPISDA atas Target Renstra dan DIPA

N O	SASARAN STATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	CAPAIAN KINERJA
			2023		
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA				
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan	Rekomenda	2	1	1



		dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	si Kebijakan			
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1
2		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA				
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1
3		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA				
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2
4		Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA				
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
5		Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan				
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	1	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	2	5	2
6		NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA				
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2	-	-
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA				
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	4	4	4
8		Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA				
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	-	1
TOTAL				21	17	15



Pada tabel 4.4 terlihat perbedaan target renstra dengan target DIPA. Namun pada tahun anggaran 2023 capaian kinerja mengikuti target yang ada di DIPA, sesuai dengan anggaran DIPA yang ada pada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur PPISDA. Target Capaian Output Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2023 berdasarkan target DIPA yaitu: 7 Rekomendasi Kebijakan, 1 Dokumen, 5 Kesepakatan dan 4 Laporan dengan total sebanyak 17 Output. Sedangkan capaian atas target DIPA tersebut yaitu 7 Rekomendasi Kebijakan, 1 Dokumen, 2 Kesepakatan dan 5 Laporan dengan total capaian sebanyak 15 Output.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA tidak dapat mencapai target 25%.

Berdasarkan perhitungan pada tabel cascading, capaian IKK Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2023 sebesar 22,91%. Adapun nilai capaian kinerja dibawah target disebabkan belum tercapainya 3 kesepakatan dari 5 Kesepakatan seperti yang tercantum dalam DIPA dan Perjanjian Kinerja TA. 2023. 2 kesepakatan yang di klaim pada tahun 2023 ini yaitu:

Tabel 4.5
Capaian 2 Proyek yang di klaim PPISDA

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	PLTM Bendungan Jenelata Sulawesi Selatan	134.219.000.000,00
2	PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000,00

Detail perhitungan capaian kinerja Direktorat PPISDA TA 2023 dapat dilihat pada tabel 4.6 cascading perhitungan capaian berikut ini:



Tabel 4.6.
Cascading Perhitungan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2023

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	BASELINE 2022 (PPISDA)	TARGET 2023 (PPISDA)	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	BASELINE 2022 (PPISDA)	TARGET 2023 (PPISDA)	JENIS INDIKATOR	Metode Perhitungan	BOBOT INDIKATOR	Kode KRO	KEGIATAN RINCIAN OUPUT	RINCIAN OUPUT
DUKMAN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat ketersediaan Investasi / Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	61,60%	100%	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00%	25,00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur SDA (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA yang disusun dibandingkan dengan target	50,00%	ABF	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA
																	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA
																	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA
																	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
												Tingkat implementasi transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur SDA (%)	Jumlah Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50,00%	AEE	KEMITRAAN	Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan
																	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
																	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

1



2

INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	TARGET RENSTRA		Bobot RO	Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen 2022	TARGET		Judul Rekomendasi Kebijakan / Proyek / Dokumen / NSPK / Layanan (Output)	CAPAIAN		Σ Capaian Komponen		Σ Capaian Rincan Output		Σ Capaian Komposit IKK		Σ Capaian Sasaran Kegiatan 2023			
	VOL	SATUAN					VOL	SATUAN		VOL	SATUAN	Σ	%	Σ Capaian Komponen	%	Σ	%	Σ	%		
Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	2	Rekomendasi Kebijakan	30%	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	50%	Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2024	1	Rekomendasi Kebijakan	RKA-KL Direktorat PPISDA TA. 2024 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) TA. 2024	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	50,0%	100%	30,0%	91%	46%	92%	46%		
Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA				Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	50%	Penyusunan Identifikasi dan Profil Proyek KPBU Sektor SDA	1	Rekomendasi Kebijakan	Pipeline Proyek KPBU Sektor SDA dan Info Memo Proyek KPBU Sektor SDA	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	50,0%								
Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	2	Rekomendasi Kebijakan	20%	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2023	1	Rekomendasi Kebijakan	SP+ Proyek KPBU DI Lhok Guci	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	100,0%	100%	20,0%						
Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	3	Rekomendasi Kebijakan	30%	Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%	Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	1	Rekomendasi Kebijakan	Penyiapan Final Business Case Proyek KPBU PLTM Jenelata 7 MW	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	40,0%	70%	21,0%						
Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA				Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA- rp	60%	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2023	1	Rekomendasi Kebijakan	Dokumen Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air'	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	30,0%								
Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	1	Rekomendasi Kebijakan	20%	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	100%	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2023	1	Rekomendasi Kebijakan	Dokumen Pemenuhan Prinsip ESG pada Proyek KPBU PLTM Jenelata	100%	Rekomendasi Kebijakan	100%	100,0%	100%	20,0%						
Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	-	Rekomendasi Kebijakan	35%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	60%	Penyiapan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA. 2023	1	Dokumen	Laporan Penyiapan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023	100%	Dokumen	100%	60,0%	78%	27,3%						
Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	2	Kesepakatan		Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2023	3	Kesepakatan	1. Dokumen Final Business Case Proyek KPBU PLTM Jenelata 7 MW 2. Dokumen Final Business Case Proyek KPBU PLTM Leuwikeris 7,4 MW	77%	Kesepakatan	26%	15,4%								
						Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur SDA Lainnya TA. 2023	2	Kesepakatan	-	13%	Kesepakatan	7%	2,6%								
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4	Laporan	35%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBU Sektor SDA TA 2023	1	Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBU Sektor SDA TA 2023	100%	Laporan	100%	100,0%	100,00%	35,0%	92,3%	46%			22,91%	
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor SDA TA 2023	1	Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor SDA TA 2023	100%	Laporan										
						Penyusunan Perkembangan Pelaksanaan Proyek KPBU SDA Tahun 2023 Melalui Media Informasi	1	Dokumen	Laporan Penyusunan Perkembangan Pelaksanaan Proyek KPBU SDA Tahun 2023 Melalui Media Informasi	100%	Laporan										
						Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Sektor SDA TA 2023	1	Dokumen	Laporan Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Sektor SDA TA 2023	100%	Laporan										
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1	Laporan	30%	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA 2023	1	Laporan	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	100%	Laporan	100%	100,0%	100%	30,0%						



4.2.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TERHADAP SASARAN KINERJA

Pada Perjanjian Kinerja, target kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur SDA sebesar 25%. Secara keseluruhan, keberhasilan akan capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun anggaran 2023 didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan yang didukung oleh 3 KRO, diantaranya: Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana (ABF), Kemitraan (AEE) dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EBD) dan Pada tabel 4.1 dapat dilihat capaian kinerja Direktorat PPISDA terhadap target PK tidak tercapai dengan nilai capaian sebesar 22,91%.

Perhitungan capaian kinerja tersebut telah dihitung dalam cascading perhitungan capaian kinerja dengan cara mengalikan capaian dari masing-masing komponen kegiatan dengan bobot yang ada pada Renstra DJPI.

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/IKK	Jenis Indikator	KRO (KodeRO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev 7	Target PK	Bobot RO	Capaian RO pada bln Desember	Capaian PK pada bln Desember
MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA										
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN										
TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyediaan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (50 %)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	4	2	25 %	30%	30%	22,91%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1		20%	20%	
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	3	2		30%	30%	
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1		20%	20%	
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (50 %)	NSPK (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2	-		-	-	
		Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU SDA Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	5		35%	27,3%	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	4	4		35%	35%	
			Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	0		30%	30%	

Tabel 4.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Rincian Output

Berbagai kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target PK tahun ini. Rendahnya capaian dari target IKK dikarenakan beberapa proyek KPBU sector Sumber Daya Air mengalami kendala, sehingga mempengaruhi kinerja Direktorat PPISDA. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi Direktorat PPISDA dalam melaksanakan proyek KPBU, yaitu:

1. Bendungan Merangin;

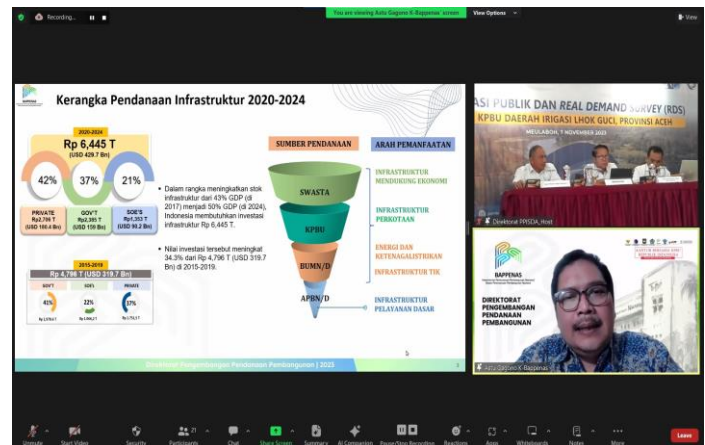


- a) Penyusunan Laporan Akhir FBC akan dilanjutkan setelah adanya Dokumen Konfirmasi Ruang Lingkup Proyek;
 - b) Diperlukan pengusulan penggunaan SBSN oleh PJPB kepada Kementerian Keuangan;
 - c) Lingkup OP Bendungan perlu dipastikan dengan menerbitkan regulasi/kebijakan/dokumentasi lain yang diperlukan.
 - d) Pernyataan komitmen penyediaan anggaran untuk pembayaran AP sebesar 350 M perlu diperbarui
 - e) *Readiness criteria* terhambat karena adanya perubahan peraturan terkait.
2. Bendungan Bodri;
 - a) Kemampuan fiskal Ditjen SDA dalam pembayaran AP Proyek KPBU Bendungan Bodri
 - b) KKPR dan Penlok Proyek KPBU Bendungan Bodri untuk Kawasan Lahan Non Perhutani dan Kawasan Lahan Perhutani tidak terbit dalam waktu yang sama
 3. PLTM Bendungan Jenelata
 - a) Timeline pembangunan Bendungan Jenelata mengalami kemunduran yang akan berdampak pada kemunduran pembangunan PLTM Jenelata;
 - b) Kapasitas Daya dari PLTM Jenelata belum terakomodir pada dokumen RUPTL PT PLN
 4. Daerah Irigasi Lhok Guci
 - ⇒ Kemampuan fiskal Ditjen. SDA dalam pembayaran AP Proyek KPBU Di Lhok Guci
 5. Pemeiliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano
 - ⇒ DJPI tengah mengupayakan kepastian usulan PLTA Tiga Dihaji 40 MW untuk dapat mengisi kuota tersebar Sumatera 90 MW atau menjadi kuota tersendiri dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
 6. Daerah Irigasi Komering
 - ⇒ Data aset yang menjadi ruang lingkup KPBU yang dibutuhkan dalam pengajuan Persetujuan Pemanfaatan BMN melalui skema Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) ke DJKN, Kemenkeu belum lengkap.
 7. Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok
 - a) Kesesuaian Pelaksanaan OP KPBU Subsektor Irigasi sehubungan dengan adanya isu Kerja Sama Pendanaan pada Pasal 57 UU SDA
 - b) Penjaminan Proyek KPBU
 8. PLTM Leuwikeris



⇒ DJPI tengah mengupayakan kepastian usulan PLTM Leuwikeris 7,4 MW untuk dapat mengisi kuota tersebar Jawa Barat 50 MW atau menjadi kuota tersendiri dalam RUPTL

Gambar 4.2
Konsultasi Publik dan Real Demand Survey (RDS) Proyek KPBUD Daerah Irigasi Lhok Guci, Provinsi Aceh



4.3 PERBANDINGAN KINERJA

4.3.1 ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan Kinerja Direktorat PPSDA pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan pagu yang tertera Perjanjian Kinerja dan DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat PPSDA selama 4 tahun masa periode renstra

NO	PERBANDINGAN	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN					
INDIKATOR KINERJA: TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA					
1	PAGU RENSTRA (rupiahdlm juta)	11.043	16.000	47.290	43.325
2	PAGU DIPA (rupiahdlm juta)	11.042	11.048	9.494	11.199
3	CAPAIAN PK	24,56%	24,25%	25%	22,91
4	CAPAIAN ANGGARAN (rupiahdlmjuta)	10.081 (90,61%)	10.022 (90,72%)	9.368 (98,67%)	10.952 (97,79%)
5	CAPAIAN OUTPUT	20	15	18	15

Pagu Renstra adalah pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sedangkan Pagu DIPA adalah pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pada tabel 4.5 terdapat perbandingan capain kinerja Direktorat PPSDA selama 4 tahun di periode renstra 2020- 2024. Penjelasannya:

- ⇒ Tren pagu renstra pada Direktorat PPSDA, Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun mengalami penurunan pada tahun 2023.
- ⇒ Tren pagu DIPA pada Direktorat PPSDA, Terjadi fluktuasi pada Pagu DIPA dari tahun ke tahun, namun tidak terjadi penurunan signifikan.
- ⇒ Capaian atas target PK, Capaian PK mengalami kenaikan pada tahun 2022 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023
- ⇒ Capaian terhadap target Anggaran, pada tahun 2020 dan 2021 Capaian anggaran relatif stabil berada di kisaran 90%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami



kenaikan +7,95% dengan nilai capaian sebesar 98,67%. Pada tahun 2023 capaian anggaran mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 97,79% dengan deviasi -0,88%

4.3.2 ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

⇒ TERHADAP RENSTRA DJPI 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah menggunakan data capaian tahun 2020-2023 dan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

NO	OUTPUT KEGIATAN		SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	CAPAIAN KINERJA					PROGRES CAPAIAN s.d 2023	DEVIASI CAPAIAN
					2020	2021	2022	2023	TOTAL		
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		RK	17	4	4	2	2	12	71%	5
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	6	2	2	1	1	6	100%	0
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	RK	11	2	2	1	1	6	55%	5
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		RK	7	1	1	1	1	4	57%	3
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	RK	7	1	1	1	1	4	57%	3
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		RK	18	3	4	3	3	13	72%	5
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	9	2	1	1	1	5	56%	4
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	9	1	3	2	2	8	89%	1
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		RK	5	1	1	1	1	4	80%	1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	RK	5	1	1	1	1	4	80%	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan			18	3	1	6	3	13	72%	5
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dok	9	3	1	1	1	6	67%	3
	2	Jumlah Pelaksanaan	KSP	9	0	0	5	2	7	78%	2



		Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	K								
6		NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSP K	12	4	2	0	0	6	50%	6
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSP K	12	4	2	0	0	6	50%	6
7		Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA	LAP	16	3	1	4	4	12	75%	4
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	16	3	1	4	4	12	75%	4
8		Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	5	1	1	1	1	4	80%	1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	5	1	1	1	1	4	80%	1
TOTAL				98	20	15	18	15	68	69%	30

Pada tabel 4.9 dapat dilihat, capaian kinerja Direktorat PPISDA selama 4 tahun ini dibandingkan dengan target renstra periode 2020-2024 dirata-rata nilainya sebesar 69% dengan 11 indikator output kegiatan lebih rendah dari target yang ditetapkan. Ada 5 indikator yang capaian outputnya masih di bawah 70 %, yaitu:

1. Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA (55%);
2. Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA (57%);
3. Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA (56%);
4. Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA (67%);
5. Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA(50%).

Dalam mencapai target jangka menengah, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Pada indikator jumlah perumusan NSPK memiliki capaian paling rendah. Hal tersebut dikarenakan selama 2 tahun yaitu tahun 2022 dan 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk indikator ini, sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam mencapai output tersebut;
2. Alokasi anggaran pada Renstra 2020-2024 tidak sama dengan yang ada pada DIPA selaku pagu anggaran yang akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, hal ini yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam mencapai target yang ada di renstra. Rencana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada pada DIPA.
3. Perubahan kebijakan hampir di setiap tahun berjalan anggaran menyebabkan



- perlunya penyesuaian peraturan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi target dan realisasi di tahun berjalan tersebut, dan
4. Dokumen Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan revisi target hingga akhir periode renstra.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan setiap indikator kegiatan yang belum mencapai target dan mengidentifikasi kembali penyebab dari deviasi capaian yang terjadi.

⇒ TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN 2020-2024)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.. Dalam RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa strategi dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, yang salah satunya adalah air tanah dan air baku aman berkelanjutan, waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Perbandingan kinerja terhadap RPJMN 2020-2024 bertujuan untuk memantau apakah pencapaian kinerja unit kerja yang ada pada suatu organisasi telah sesuai dengan target rencana pembangunan nasional. Hasil perbandingan ini dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan optimalisasi kinerja di tahun berikutnya agar selaras dengan target RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja unit kerja terhadap target RPJMN menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk sinergi dan kontribusi nyata terhadap pencapaian rencana pembangunan lima tahunan.

Dalam pemenuhan target RPJMN, Kementerian PUPR c.q DJPI turut berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) yaitu mendukung capaian kinerja Major Project (Proyek Prioritas Strategis) melalui pelaksanaan Proyek KPBU.

Rincian Proyek KPBU yang mendukung *Major Project* RPJMN 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA**

Dalam hal mendukung Major Project ini, Direktorat PPISDA yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan DJPI, ikut berkontribusi melalui penyediaan



listrik melalui Proyek KPBU. Proyek-proyek tersebut yaitu:

- a. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW dengan total nilai investasi sebesar Rp170 Miliar. Status proyek saat ini yaitu dalam proses persetujuan pemenang lelang kepada Menteri PUPR. Penetapan pemenang lelang ditargetkan pada bulan Januari 2024, dan Financial Close (FC) serta Konstruksi ditargetkan pada tahun 2025;
- b. Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW Pada Bendungan Tiga Dihaji dengan total nilai investasi sebesar 1,12 Triliun. Status proyek saat ini yaitu Request for Proposal, dimana sedang dilakukan penyusunan dokumen penawaran oleh peserta pelelangan. Penetapan pemenang lelang dan penandatanganan perjanjian KPBU ditargetkan akan dilakukan pada tahun 2024, FC dan konstruksi pada tahun 2025;
- c. PLTM Karalloe dengan total nilai investasi sebesar Rp127 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi Pra FS. Proyek ini diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024;
- d. PLTM Temef dengan total nilai investasi sebesar Rp55 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi Pra FS. Proyek ini diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024;
- e. Penyediaan Infrastruktur Bendungan dan PLTA di Papua dengan total nilai investasi sebesar Rp18,29 Triliun. Status proyek saat ini yaitu penyusunan dokumen FS yang ditargetkan selesai pada bulan Februari 2024. f. PLTM Leuwikeris dengan total nilai investasi sebesar Rp225 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi dokumen FS.

2. Mendukung Pencapaian 18 Waduk Multiguna pada RPJMN 2020-2024

Dalam mendukung pencapaian *Major Project* 18 Waduk Multiguna pada RPJMN 2020-2024, Direktorat PPISDA juga turut berkontribusi dalam pembangunan Bendungan dengan skema KPBU. Dari 6 bendungan KPBU yang termasuk *Major Project* 18 Waduk Multiguna pada RPJMN, terdapat 1 proyek yaitu Bendungan Merangin yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat PPISDA. Bendungan Merangin memiliki nilai investasi Rp7,85 Triliun, dan saat ini dalam proses penyusunan dokumen Final Business Case (FBC). Pembangunan Bendungan Merangin ini bertujuan untuk mengairi irigasi seluas 5.244 Ha, penyedia air baku untuk air minum hingga 0,565 m³ /s, mereduksi banjir sebesar 200 m³ /s, PLTA sebesar 90-107,5 MW, dan sebagai destinasi pariwisata. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2024.



Selain proyek Bendungan Merangin, Direktorat PPISDA juga saat ini tengah menyiapkan proyek waduk multiguna lainnya yaitu Bendungan Bodri. Bendungan Bodri memiliki nilai investasi Rp1,74 Triliun, dan saat ini dalam proses pemenuhan Readiness Criteria untuk masuk tahap Transaksi. Tujuan pembangunan Bendungan Bodri yaitu untuk menyuplai kebutuhan air baku di Kabupaten Kendal sebesar 0,497 m³ /dt, menambah pasokan air irigasi untuk meningkatkan intensitas tanam Daerah Irigasi Bodri seluas 8.665 Ha, mereduksi debit banjir (Q50) di kali Bodri di Kabupaten Kendal sebesar 10,23% (64,81 m³ /dt) dan memiliki potensi PLTM sebesar 3,2 MW. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2024.

4.3.3 PERBANDINGAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA SETARA

Direktorat PPISDA merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah unit organisasi DJPI, dengan demikian jikapun ingin melakukan sandingan kinerja rasanya lebih pas jika disandingkan dengan unit kerja yang setara. Melakukan Perbandingan kinerja antara unit kerja setara lintas kementerian maupun lintas unit organisasi bagi kami rasanya cukup sulit, mengingat data capaian unit kerja yang belum terpublikasi secara terbuka seperti data capaian yang ada pada unit organaisasi maupun kementerian. Hal tersebutlah, yang mendasari kami untuk menyandingkan capaian dengan unit kerja yang ada pada internal DJPI. Namun, dalam sandingan ini sifatnya hanya sebagai benchmark internal kami dalam mecapai kinerja kami di tahun berikutnya:

Tabel 4.10.
Perbandingan Kinerja antar Unit Kerja Setara

No	Uraian	Direktorat PPISDA	Direktorat PPIP
1	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.
2	IKK	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan PPIP
3	Pagu Awal	Rp 12.399.643.000,00	Rp 12.800.000.000,00
	Pagu Akhir	Rp 11.399.643.000,00	Rp 12.800.000.000,00
	Revisi Anggaran	Dilakukan beberapa kali; di manfaatkan untuk internal dan lintas unit kerja dalam	Revisi anggaran hanya dilakukan internal kegiatan tanpa merubah total pagu.



No	Uraian	Direktorat PPSDA	Direktorat PPIP
		rangka optimalisasi anggaran	
4	Capaian IKK terhadap PK	22,91%	24,8%
	Deviasi	-2,09	-0,2
5	Capaian Anggaran	Rp 10.952.077.000,00 97,79%	Rp12.614.785.419,00 98.55%
	Sisa Anggaran	Rp 247.566.000,00 (2,2%)	Rp185.214.581,00 (1.45%).
6	Target Proyek (Renstra)	2 kesepakatan	4 Kesepakatan
	Target Proyek (DIPA/Renja)	5 Kesepakatan	2 Kesepakatan
	Capaian Proyek KPBU	2 Kesepakatan; yaitu: - PLTM Bendungan Jenelata Sulawesi Selatan - PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	1 Kesepakatan - B2B SPAM Hilir Kota Tangerang

Penjelasan:

- ⇒ Kedua Direktorat memiliki tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan namun fokus tugas yang berbeda, dengan PPSDA berfokus pada sumber daya air dan PPIP pada permukiman.
- ⇒ Direktorat PPIP memiliki capaian IKK yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Direktorat PPSDA, namun keduanya memiliki deviasi negatif dari target capaian.
- ⇒ Terhadap pagu awal, terdapat revisi anggaran pada kedua direktorat, namun Direktorat PPSDA mengalami penurunan pada pagu anggaran di akhir tahun, sedangkan Direktorat PPIP tetap pada pagu yang sama dengan revisi anggaran yang hanya dilakukan internal kegiatan.
- ⇒ Terhadap capaian anggaran; Keduanya memiliki sisa anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan total pagu, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.



⇒ Terhadap target kesepakatan pada proyek KPBU tahun ini;

- Direktorat PPISDA; terhadap target Renstra, capaian kesepakatan proyek telah tercapai sesuai dengan target yaitu 2 kesepakatan. Namun jika disandingkan dengan target DIPA, capaian kesepakatan proyek KPBU SDA masih belum tercapai dengan nilai capaian sebesar 2 kesepakatan dari 5 target kesepakatan.
- Direktorat PPIP; terhadap target Renstra, capaian kesepakatan proyek masih belum tercapai sesuai dengan target yaitu 4 kesepakatan, terdapat deviasi yang cukup tinggi. Namun jika disandingkan dengan target DIPA, capaian kesepakatan proyek KPBU Direktorat PPIP juga belum tercapai dengan nilai capaian sebesar 1 kesepakatan dari 2 kesepakatan.

4.4 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Direktorat PPISDA TA 2023 sebesar Rp 10.952.077,000,00 setara dengan 97,79% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.300.643.000,00 sisa anggaran sebesar Rp 247.566.000,00. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,83%. Pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air menunjukkan kinerja meningkat, dengan capaian kinerja sebesar 98,83% dari bulan sebelumnya sebesar 81% dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.199.643.000,00. Jika dilihat dari tabel warna capaian kinerja bulanan yang ada di aplikasi emonitoring pupr, apabila nilai capaian kinerja dengan kriteria kinerja > 85% persentasinya maka berada pada zona warna biru dan diinterpretasikan MEMUASKAN. Detail angka realisasi anggaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.11.
Realisasi Anggaran TA 2023

Sumber : Emonitoring online status 31 Desember 2023

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu (Rp dlm ribu)	Realisasi (Rp dlm ribu)	Keuangan		Fisik	
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		11.399.643	10.952.077	100	97,79	100	98,83
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.650.000	1.633.002	100	98,97	100	100

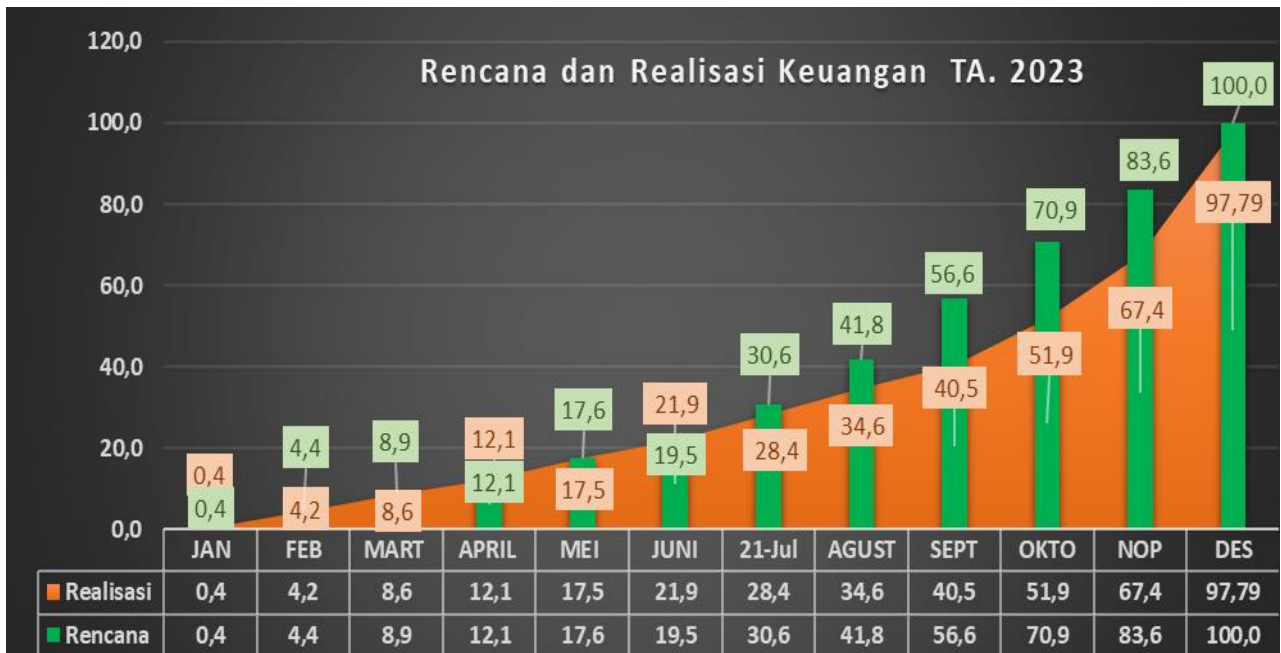


Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu (Rp dlm ribu)	Realisasi (Rp dlm ribu)	Keuangan		Fisik	
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)
	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.750.000	1.738.427	100	99,34	100	100
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	2.640.000	2.598.026	100	98,41	100	100
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.000.000	993.262	100	99,33	100	100
Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	2.199.643	2.057.557	100	93,54	100	94,09
Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	960.000	952.969	100	99,27	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA)	Layanan Perkantoran	1.000.000	978.834	100	97,88	100	100

4.4.1 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN TA 2023

Sepanjang tahun 2023, realisasi anggaran pada Direktorat PPISDA mengalami pencapaian target yang cukup baik dengan selisih yang relative kecil antara rencana dan realisasi. Hal ini ditunjukkan pada Kurva S berikut ini:





Gambar.4.2. Capaian Anggaran Direktorat PPISDA sepanjang TA 2023

Pada pertengahan hingga akhir tahun, terdapat penurunan signifikan dalam pencapaian target. Terdapat selisih yang semakin besar antara rencana dan realisasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa proyek KPBUs yang saat ini sedang dikerjakan Direktorat PPISDA, mengalami kemunduran capaian dari timeline yang sudah di jadwalkan, hal tersebut karena adanya beberapa kendala teknis di lapangan. Kemunduran progres proyek KPBUs ini berdampak terhadap penyerapan anggaran, karena beberapa kegiatan harus *reschedule* jadwal. Sehingga secara otomatis penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana awal.

Pada bulan Desember pencapaian target hampir sempurna, namun tetap ditemukan selisih yang perlu dievaluasi untuk menyusun strategi perencanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan target di masa mendatang dan memastikan pencapaian target yang optimal.

Selama periode periode renstra 2020-2024, capaian realisasi anggaran Direktorat PPISDA mengalami peningkatann. Capaian realisasi anggaran di tahun 2020 sebesar 90,61%, sedangkan capaian pada tahun anggaran 2021 meningkat 0,11%. Pada tahun anggaran 2022 realisasi anggaran Direktorat PPISDA mengalami peningkatan kembali 7,95% dengan angka capaian sebesar 98,67%. Selanjutnya pada tahun anggaran 2023 realisasi anggaran Direktorat PPISDA mengalami penurunan dengan angka capaian sebesar 92,59%



4.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi atau entitas telah memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (seperti waktu, anggaran, sumber daya manusia dan materi) untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efektif.

Pada tahun 2023, Direktorat PPISDA melakukan beberapa kali revisi anggaran dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran. Perubahan tersebut menggunakan mekanisme revisi POK maupun revisi DIPA yang melibatkan Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dalam rangka menganalisis efisiensi sumber daya yang ada pada Direktorat PPISDA, berikut data-data yang dibutuhkan:

Tabel 4.12.
Efisiensi Sumber Daya TA 2023

No	Uraian	Sumber Daya
3	Jumlah Pegawai pada TA. 2023	46 Pegawai, dengan rincian: ASN: 24 Pegawai P3K: 6 Pegawai Honorar: 8 Pegawai Tenaga Pendukung Individu (Non PNS): 8 Pegawai
	Kebutuhan Pegawai	54 Pegawai (sesuai dengan data pada peta jabatan Direktorat PPISDA)
3	Capaian IKK terhadap PK	22,91%, dengan Output sebesar 15
	Deviasi	-2,09
4	Pagu Awal	Rp 12.399.643.000,00
	Pagu Akhir	Rp 11.399.643.000,00
	Revisi Anggaran	Dilakukan beberapa kali; dalam rangka optimalisasi anggaran.
5	Realisasi Anggaran	Rp 10.952.077.000,00 (97,79%)
	Sisa Anggaran	Rp 247.566.000,00 (2,2%)

Penjelasan:



1. Terhadap Pegawai: Direktorat PPISDA kekurangan 8 pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan. ASN memiliki jumlah pegawai yang paling banyak, mencapai 52,17%; Tenaga P3K menyumbang 11,11% dari total kebutuhan pegawai. Sedangkan Honorer dan Tenaga Pendukung Individu (Non PNS) masing-masing menyumbang 14,81% dari total kebutuhan pegawai;
2. Terhadap Capaian IKK: Capaian IKK Direktorat PPISDA masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 25%, dengan deviasi sebesar -2,09%. Direktorat PPISDA perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja untuk mencapai target IKK yang ditetapkan;
3. Terhadap anggaran: Direktorat PPISDA telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mencapai realisasi sebesar 97,79% dari Pagu anggaran. Namun, masih perlu dilakukan evaluasi terhadap sisa anggaran sebesar 2,2% untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Evaluasi ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi sumber daya anggaran dan mencapai pencapaian target yang lebih optimal untuk periode anggaran selanjutnya. Sisa anggaran yang ada juga dapat dioptimalkan dengan cara digunakan untuk prioritas-proiritas yang mendesak atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi.

4 . 6 ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN

Analisis pemanfaatan laporan pada unit kerja merupakan kunci untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang ada. Berikut adalah analisis mengenai pemanfaatan laporan pada Direktorat PPISDA:

1. Sebagai Monitoring dan Evaluasi Capaian bulanan:

Setiap bulannya Direktorat PPISDA telah menyusun laporan monev bulanan yang yang digunakan untuk:

- Membantu dalam memonitoring dan mengukur capaian target yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan, sehingga memungkinkan untuk identifikasi dini terhadap potensi hambatan atau kendala yang mungkin timbul sehingga dapat dilakukan tindakan korektif yang diperlukan. Kendala/permasalahan tertuang dalam Laporan Monev bulanan pada Bab 2 terkait capaian kinerja, dan identifikasi masalah pada Bab 3;



- Informasi yang disajikan dalam laporan Monev bulanan Direktorat PPISDA dijadikan basis dalam pengambilan keputusan untuk rencana perbaikan dan penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan;

2. Sebagai Perencanaan dan Pengambilan Keputusan:

- Data dan informasi dari laporan kinerja digunakan sebagai dasar untuk menentukan alokasi sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas lainnya, pada tahun anggaran berikutnya;
- Hasil evaluasi dari laporan kinerja Direktorat PPISDA dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan atau memodifikasi kebijakan yang ada, digunakan juga untuk menyusun perencanaan penggunaan anggaran di tahun berikutnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Bersifat Akuntabilitas dan Transparansi:

Laporan kinerja Direktorat PPISDA digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah di tanda tangani di awal tahun. Kemudian laporan ini juga di publikasikan untuk menunjukkan komitmen transparansi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang telah digunakan kepada publik.

Kesimpulan:

Pemanfaatan laporan kinerja pada unit kerja di Organisasi sangat penting dalam evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan laporan kinerja, Direktorat PPISDA perlu meningkatkan kualitas laporan, memperkuat kapasitas SDM, dan mengembangkan sistem informasi yang efektif. Dengan demikian, Direktorat PPISDA dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Organisasi secara keseluruhan.





BAB V

Penutup

PENUTUP

5

Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud nyata akuntabilitas kinerja yang kompleks pada instansi/organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran serta target yang telah diamanatkan dalam Renstra, DIPA maupun Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ataupun Kegagalan dalam pencapaian kinerjanya, semua tertuang dalam laporan kinerja. Dari proses perencanaan hingga akhir pencapaian kinerja.

5.1 SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2023.

Selama TA 2023, Direktorat PPISDA mengalami 2x Revisi DIPA dan Revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 2x. Hal tersebut dikarenakan adanya optimalisasi anggaran internal DJPI. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direkeur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023.

Capaian Direktorat PPISDA terhadap sasaran kegiatan (SK) meningkatnya penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,91% dari target sebesar 25% pada Perjanjian Kinerja.

Sedangkan Realisasi anggaran Direktorat PPISDA TA 2023 sebesar Rp 10.952.077,000,00 setara dengan 97,79% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.300.643.000,00 sisa anggaran sebesar Rp 247.566.000,00. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,83%.

Pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air menunjukkan kinerja meningkat, dengan capaian kinerja sebesar 98,83% dari bulan sebelumnya sebesar 81% dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.199.643.000,00. Jika dilihat dari tabel warna capaian kinerja bulanan yang ada di aplikasi emonitoring pupr,



apabila nilai capaian kinerja dengan kriteria kinerja > 85% persentasinya maka berada pada zona warna biru dan diinterpretasikan MEMUASKAN.

5.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Pendukung keberhasilan Laporan Kinerja melibatkan kontribusi positif terhadap capaian kinerja. Faktor pendukung yang telah diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air diantaranya:

1. Keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, sumber daya yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan fokus pada capaian organisasi.
2. melakukan pemutakhiran data terhadap isu dan progress Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2023
3. Direktorat PPISDA selama TA 2023 telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai berikut:
 - a. Laporan mingguan yaitu pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat progres kinerja mingguan seperti: progress anggaran, progress proyek KPBU, kendala, isu strategis tindak lanjut serta kegiatan yang dilaksanakan selama seminggu.
 - b. Laporan Bulanan yaitu pemantauan dan evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengukur progres kinerja setiap bulan seperti: progress anggaran, progres atas target Renstra dan Perjanjian Kinerja, progress proyek KPBU, kendala, isu strategis, tindak lanjut serta kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi per Quartal, Pemantauan dan evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengukur progres kinerja per 4 bulan, waktu pelaksanaan:
 - Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA Quartal I TA 2023 diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022 di Grand Kemang Hotel



- Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA dan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Air Quartal II TA 2023 diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 di Hotel Ambhara
- Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA dan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Air Quartal III TA 2023 diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Penyiapan KPBU TA 2022 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2023-2024 pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 di Hilton Bali Resort
- Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA dan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Air Quartal IV TA 2023

5.3 PERMASALAHAN

1. Dinamisasi alokasi anggaran Dit. PPISDA. Berdasarkan usulan anggaran TA. 2023 Dit. PPISDA mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,14 Miliar. Namun berdasarkan Pagu Indikatif Dit. PPISDA hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11,39 Miliar, sedangkan pada Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran mendapatkan anggaran sebesar 12,39 Miliar
2. Belum adanya kepastian kapasitas fiskal Ditjen. SDA untuk pembayaran Availability Payment (AP). Berdasarkan informasi dari Dit. SSPSDA, pada tahun 2026 Ditjen. SDA memiliki kapasitas fiskal untuk pembayaran AP sebesar Rp 800 M, namun akan terjadi peningkatan kebutuhan pembayaran AP pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran AP tersebut.
3. Belum terdapat studi terkait Blended Finance Proyek KPBU SDA. Dalam rangka mengurangi beban fiskal APBN dalam pembayaran AP, maka diperlukan kajian penggunaan blended finance dalam pemenuhan pembayaran AP
4. Pelaksanaan KPBU OP berdasarkan UU SDA 17/2019 Pasal 57 ayat (8) yang menyatakan bahwa kerja sama pendanaan tidak termasuk kerja sama dalam



pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk pelaksanaan KPBU sektor SDA.

5. Pada proyek KPBU yang memanfaatkan Bendungan Multiguna milik Kementerian PUPR untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, isu yang berkembang yaitu proses pengadaan BUP yang lama karena terdapat 2 tahap pengadaan yakni di Kementerian PUPR dan di PT PLN (Persero).

5.4 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 pada Program Dukungan Manajemen yang terkait dengan Proyek KPBU Sektor SDA adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan skema pembiayaan Hybrid Annuity Model (HAM) kepada IB untuk menurunkan AP Proyek KPBU DI Lhok Guci
2. DJPI melalui Direktorat PPISDA akan menyampaikan Konfirmasi Final AP dengan melampirkan Dokumen Reviu FBC, SLA dan Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU Bendungan Bodri kepada Kementerian Keuangan
3. Melakukan pembahasan dan kesepakatan antara DJPI dan Ditjen Sumber Daya Air mengenai Pelaksanaan KPBU OP berdasarkan UU SDA 17/2019 Pasal 57 ayat (8) yang menyatakan bahwa kerja sama pendanaan tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk pelaksanaan KPBU sektor SDA
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Melalui Optimasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan Kementerian PUPR untuk Mendukung Pengembangan Energi Terbarukan;
5. Percepatan waktu pelaksanaan pengadaan BUP KPBU yang semula 6 bulan menjadi 3 bulan melalui program Fast Track PPP.



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2020-2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Kementerian PUPR. 2023. Integrated E-Monitoring Kementerian PUPR
<https://emonitoring.pu.go.id/> (Status Database 31 Desember 2023 pukul 16.00 WIB).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN